



Catatan Atas LAPORAN KEUANGAN

Audited 2024

LKKPN PEKANBARU
TA 2024



Bagus Wak
Bersih, Amanah, Giat Untuk
Sumberdaya Kawasan Konservasi



**LOKA KAWASAN
KONSERVASI PERAIRAN
NASIONAL PEKANBARU**

Catatan Atas Laporan Keuangan
Audited
Untuk Periode yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2024

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan *Audited* Tahun 2024 Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Satker Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun Laporan Keuangan *Audited* Tahun 2024 berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan *Audited* Tahun 2024.

Penyusunan Laporan Keuangan *Audited* Tahun 2024 Satker Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan *Audited* Tahun 2024 ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan *Audited* Tahun 2024 ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas /pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Satker Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru. Di samping itu, Laporan Keuangan *Audited* Tahun 2024 ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pekanbaru, 5 Mei 2025

Dr. R. Irfansyah, M.Si LKKPN Pekanbaru,



Dr. R. Irfansyah, M.Si

NIP. 8212172014031001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	x
Daftar Isi	x
Pernyataan Tanggung Jawab	x
Ringkasan	x
I. Laporan Realisasi Anggaran	x
II. Neraca	x
III. Laporan Operasional	x
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	x
V. Catatan atas Laporan Keuangan <i>Audited</i> Tahun 2024	x
A. Penjelasan Umum	x
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	x
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	x
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	x
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	x
F. Pengungkapan Penting Lainnya	x
VI. Lampiran dan Daftar	x

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
SATKER LOKA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL
PEKANBARU
Jl. Budiluhur, Kelurahan Kulim, Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Satker Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan *Audited* Tahun 2024 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pekanbaru, 5 Mei 2025
Kepala LKKPN Pekanbaru,



Rahmat Irfansyah, M.Si
NIP. 198212172014031001

Laporan Keuangan *Audited* Tahun 2024 Satker Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan *Audited* Tahun 2024 ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024. Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp164,934,448 berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp164,934,448 atau mencapai 906.08 persen dari estimasi Pendapatan LRA sebesar Rp18,203,000.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp17,445,286,666 atau mencapai 99.21 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp17,494,247,000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada 31 Desember 2024 . Nilai Aset per 31 Desember 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp15,882,917,608 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp829,700; Piutang Jangka Panjang sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp15,880,550,548 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp1,537,360. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp50,993,284 dan Rp15,831,924,324.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp162,246,370 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp15,307,929,538 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar Rp-15,145,683,168, Defisit Kegiatan Non

Operasional dan Defisit Pos Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp-674,461,786 dan Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp-15,820,144,954.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2024 sebesar Rp14,372,562,935, dikurangi Defisit-LO sebesar Rp-15,820,144,954 kemudian dikurangi dengan koreksi-koreksi sebesar -845,875 dan Transaksi Antar Entitas sebesar 17,280,352,218 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2024 adalah senilai Rp15,831,924,324

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN AUDITED TAHUN 2024

Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis suatu nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CALK adalah penyajian informasi yan diharuskan dan diajurkan oleh Standar AKuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2024 disusun dan disajikan perdasarkan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

SATKER LOKA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL
PEKANBARU
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE AUDITEDYANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

U R A I A N	Catatan	T A 2024		% thd Angg	T A 2023
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
Belanja Pegawai	B.2.1	5,373,183,000	5,371,699,184	99.97	4,868,460,815
Belanja Barang	B.2.2	8,909,351,000	8,774,540,162	98.49	7,122,791,322
Belanja Modal	B.2.3	3,301,896,000	3,299,047,320	99.91	534,782,000
Belanja Bantuan Sosial	B.2.4	-	-	-	-
JUMLAH BELANJA		17,584,430,000	17,445,286,666	99.21	12,526,034,137

Catatan atas Laporan Keuangan Audited Tahun 2024 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Audited Tahun 2024

II. NERACA

SATKER LOKA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL
PEKANBARU

NERACA AUDITED
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Catatan	2024	2023
ASET			
ASET LANCAR			
Persediaan	C.1	829,700	4,266,180
Jumlah Aset Lancar		829,700	4,266,180
ASET TETAP			
Tanah	C.2	5,587,783,737	5,587,783,737
Peralatan dan Mesin	C.3	10,632,134,422	10,691,594,352
Gedung dan Bangunan	C.4	7,864,462,320	4,829,408,000
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.5	2,966,112,339	2,966,112,339
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.6	-	477,649,864
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.7	(11,169,942,270)	(10,373,231,919)
Jumlah Aset Tetap		15,880,550,548	14,179,316,373
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.8	-	1,899,000
Aset Lain-lain	C.9	325,351,930	199,500,000
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.10	(323,814,570)	(949,500)
Jumlah Aset Lainnya		1,537,360	200,449,500
JUMLAH ASET		15,882,917,608	14,384,032,053
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.11	50,993,284	11,469,118
JUMLAH KEWAJIBAN		50,993,284	11,469,118
EKUITAS			
Ekuitas	C.12	15,831,924,324	14,372,562,935
JUMLAH EKUTAS		15,831,924,324	14,372,562,935
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		15,882,917,608	14,384,032,053

Catatan atas Laporan Keuangan Audited Tahun 2024 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Audited Tahun 2024

III. LAPORAN OPERASIONAL

SATKER LOKA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL
PEKANBARU

LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE AUDITED
BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2024	2023
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	162,246,370	430,302,419
Jumlah Pendapatan		162,246,370	430,302,419
BEBAN			
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai	D.2	5,409,863,282	4,845,149,188
Beban Persediaan	D.3	54,296,003	70,582,683
Beban Barang dan Jasa	D.4	5,215,367,955	3,617,282,030
Beban Pemeliharaan	D.5	426,313,157	709,412,062
Beban Perjalanan Dinas	D.6	2,883,849,595	2,520,321,695
Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	199,510,000	199,992,900
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.8	1,118,729,546	1,219,888,644
Jumlah Beban		15,307,929,538	13,182,629,202
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		(15,145,683,168)	(12,752,326,783)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar	D.9	(677,149,864)	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.10	2,688,078	887,110
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		(674,461,786)	887,110
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa		(15,820,144,954)	(12,751,439,673)
-		-	-
SURPLUS/DEFISIT - LO		(15,820,144,954)	(12,751,439,673)

Catatan atas Laporan Keuangan Audited Tahun 2024 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Audited Tahun 2024

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

SATKER LOKA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL
PEKANBARU

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE AUDITED
BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Catatan	2024	2023
EKUITAS AWAL	E.1	14,372,562,935	15,003,777,304
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2	(15,820,144,954)	(12,751,439,673)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3	-	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.4	(845,875)	62,880,888
Penyesuaian Nilai Aset	E.41	-	-
Koreksi Nilai Persediaan	E.42	-	-
Koreksi Atas Reklasifikasi	E.43	-	-
Selisih Revaluasi Aset	E.44	-	-
Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	E.45	(845,875)	62,880,888
Koreksi Lain-Lain	E.46	-	-
Jumlah		(845,875)	62,880,888
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	17,280,352,218	12,095,379,608
KENIAKAN/PENURUNAN EKUITAS		1,459,361,389	(593,179,177)
EKUITAS AKHIR	E.6	15,831,924,324	14,410,598,127

Catatan atas Laporan Keuangan Audited Tahun 2024 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Audited Tahun 2024

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru

<i>Dasar</i>	Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru didirikan sebagai salah satu upaya Pemerintah untuk
<i>Hukum</i>	Entitas berkedudukan di Jalan Budiluhur Kelurahan
<i>Entitas dan</i>	Mentangor Kecamatan Kulim Pekanbaru.
<i>Rencana</i>	Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru mempunyai tugas dan fungsi mengelola kawasan konservasi yang efektif dan penyajian laporan keuangan yang baik dan handal. Melalui peran tersebut diharapkan laporan K/L dapat ditingkatkan kualitas yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.
<i>Strategis</i>	Untuk mewujudkan tujuan diatas Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru berkomitmen dengan visi "mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan keuangan negara yang efisien, akuntabel dan transparan melalui pembinaan akuntansi pemerintah menuju laporan keuangan Kementerian/Negara yang berkualitas" Untuk mewujudkan visi tersebut LKKPN Pekanbaru melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut: - Menyelenggarakan pembinaan yang berkelanjutan berkaitan implementasi akuntansi pemerintah kepada Kementerian negara/Lembaga. - Membina secara efektif Kementerian negara/Lembaga dalam pemanfaatan informasi keuangan yang dihasilkan oleh sistem akuntansi yang diimplentasikan. - Mengembangkan sistem pembinaan yang profesional dan terpercaya. - Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal kepada para pemangku kepentingan.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan Audited Tahun 2024

Laporan Keuangan *Audited* Tahun 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Satker LKKPN Pekanbaru. Laporan Keuangan *Audited* Tahun 2024 ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan *Audited* Tahun 2024 Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Satker Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, PMK Nomor 214/PMK.05/2017 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat serta PMK Nomor 183/PMK.05/2020 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Dasar

Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam Laporan Keuangan *Audited* Tahun 2024. Dasar pengukuran yang diterapkan Satker Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan *Audited* Tahun 2024 adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos Laporan Keuangan *Audited* Tahun 2024 menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan

Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan *Audited* Tahun 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan *Audited* Tahun 2024. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam Laporan Keuangan *Audited* Tahun 2024 ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan

Akuntansi dan PeLaporan Keuangan *Audited* Tahun 2024 yang merupakan entitas pelaporan dari Satker Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan *Audited* Tahun 2024 Satker Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-
LRA*

(1) Pendapatan- LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-
LO*

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan PeLaporan Keuangan *Audited* Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
- Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
- Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan *Audited* Tahun 2024.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan

manfaat ekonomi atau potensi jasa.

- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan *Audited* Tahun 2024.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh

tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk

kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan

manfaat dari suatu aset tetap.

- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang
Jangka
Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset
Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas	20

Tanaman Semusim.	
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban **(6) Kewajiban**

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar

nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, *Satker Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru* telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal sebanyak 19 (sembilan belas) kali. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain:

1. Revisi I merupakan revisi anggaran dalam hal pagu anggaran tetap dan revisi administrasi yakni pencantuman anggaran blokir (AA), Pembukaan blokir dalam halaman IV.A DIPA dan revisi perubahan volume RO pada program dukungan manajemen sesuai surat usulan B.111/DJPKRL/RC.420/I/2024 tanggal 22 Januari 2024 dengan tujuan untuk antisipasi terhadap perubahan kondisi dan prioritas kebutuhan dengan volume keluaran output berubah.
2. Revisi II merupakan revisi anggaran dengan rincian usulan revisi anggaran terhadap revisi halaman III DIPA sesuai surat usulan revisi nomor : B.287/LKKPN/RC.420/II/2024 tanggal 7 Februari 2024 dengan tujuan antisipasi terhadap perubahan kondisi dan prioritas kebutuhan, meningkatkan efektifitas dan kualitas belanja dengan volume RO tetap.
3. Revisi III merupakan revisi anggaran halaman III DIPA sesuai surat usulan revisi anggaran nomor : B.607/LKKPN/RC.420/IV/2024 tanggal 2 April 2024 dengan alasan antisipasi terhadap perubahan kondisi dan prioritas kebutuhan, meningkatkan efektifitas dan kualitas belanja dengan volumen RO tetap.
4. Revisi IV merupakan revisi anggaran halaman III DIPA sesuai surat usulan nomor : B.642/LKKPN/RC.420/IV/2024 tanggal 17 April 2024 tentang usulan revisi halaman III DIPA dengan pertimbangan antisipasi perubahan kondisi dan prioritas kebutuhan, meningkatkan efektifitas dan kualitas

belanja dengan volume RO tetap.

5. Revisi V merupakan revisi anggaran dengan usulan revisi anggaran pada halaman III DIPA dengan pertimbangan antisipasi terhadap perubahan kondisi dan prioritas kebutuhan, meningkatkan efektivitas dan kualitas belanja dengan volume RO tetap sesuai surat usulan revisi halaman III DIPA nomor B.642/LKKPN/RC.420/IV/2024 tanggal 17 April 2024.
6. Revisi VI merupakan usulan revisi anggaran halaman III DIPA dengan pertimbangan antisipasi terhadap perubahan kondisi dan prioritas kebutuhan, meningkatkan efektivitas dan kualitas belanja dengan volume RO tetap sesuai surat usulan revisi nomor : B.919/LKKPN/RC.420/VI/2024 tanggal 28 Mei 2024.
7. Revisi VII merupakan usulan revisi anggaran dengan pembukaan blokir dalam halaman IV.A DIPA terkait RSPP, selanjutnya Revisi antar RO prioritas Nasional (PN) dalam 1(satu) program dan dalam 1(satu) kegiatan dengan pagu anggaran tetap atas pertimbangan antisipasi terhadap perubahan kondisi dan prioritas kebutuhan dan volume keluaran (Output) berubah sesuai surat usulan nomor : 132/DJPKRL/RC.420/VI/2024 tanggal 13 Juni 2024.
8. Revisi VIII merupakan revisi anggaran pemutakhiran KPA yakni pemuktahiran data POK dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas belanja sesuai surat usulan nomor : B.1088/LKKPN/RC.420/VI/2024 tanggal 24 Juni 2024.
9. Revisi IX revisi anggaran pemutakhiran KPA yakni pemutakhiran Data POK dan meningkatkan efektifitas dan kualitasa belanja sesuai surat usulan revisi anggaran nomor : B.1088/LKKPN/RC.420/VI/2024 tanggal 24 Juni 2024.
10. Revisi X merupakan revisi halaman III DIPA atas dasar pertimbangan antisipasi terhadap perubahan kondisi dan prioritas kebutuhan, untuk meningkatkan efektifitas dan kualitas belanja sesuai surat usulan revisi nomor B.1190/LKKPN/RC.420/VII/2024 tanggal 9 Juli 2024.

11. Revisi XI merupakan revisi anggaran pmutakhiran data POK untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas belanja sesuai surat usulan revisi anggaran nomor : B.1066/LKKPN/RC.420/VII/2024 tanggal 22 Juli 2024.
12. Revisi XII merupakan revisi anggaran pmutakhiran Data POK untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas belanja sesuai surat usulan revisi anggaran nomor B.1473/LKKPN/RC.420/VIII/2024 tanggal 26 Agustus 2024.
13. Revisi XIII merupakan revisi halaman III DIPA untuk antipasi terhadap perubahan kondisi dan prioritas kebutuhan, meningkatkan efektifitas dan kualitas belanja surat usulan revisi anggaran nomor B.1730/LKKPN/RC.420/X/2024 tanggal 8 Oktober 2024.
14. Revisi XIV merupakan revisi perubahan/pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu anggaran tetap dan revisi administrasi, terdapat pergeseran anggaran antar Satker dalam 1 (satu) rincian output yang sama dalam 1 (satu) jenis belanja dalam rangka pemenuhan kekurangan belanja pegawai operasional sesuai surat usulan revisi anggaran nomor B.275/LKKPN/RC.420/XI/2024 tanggal 8 November 2024.
15. Revisi XV merupakan revisi Pmutakhiran KPA data POK untuk meningkatkan efektifitas dan kualitas belanja sesuai surat usulan revisi anggaran nomor B.1947/LKKPN/RC.420/XI/2024 tanggal 11 November 2024.
16. Revisi XVI merupakan revisi penghematan anggaran belanja perjalanan dinas dengan mekanisme blokir sebagian pada akun perjalanan dinas sesuai pertimbangan Surat Menteri Keuangan nomor : S-1023/MK.02/2024 tanggal 7 November 2024 surat usulan revisi anggaran nomor B.1954/LKKPN/RC.420/XI/2024 tanggal 18 November 2024.
17. Revisi XVII merupakan revisi pmutakhiran data POK (KPA) untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas belanja sesuai surat usulan revisi anggaran nomor B.2089/LKKPN/RC.420/XII/2024 tanggal 10 Desember

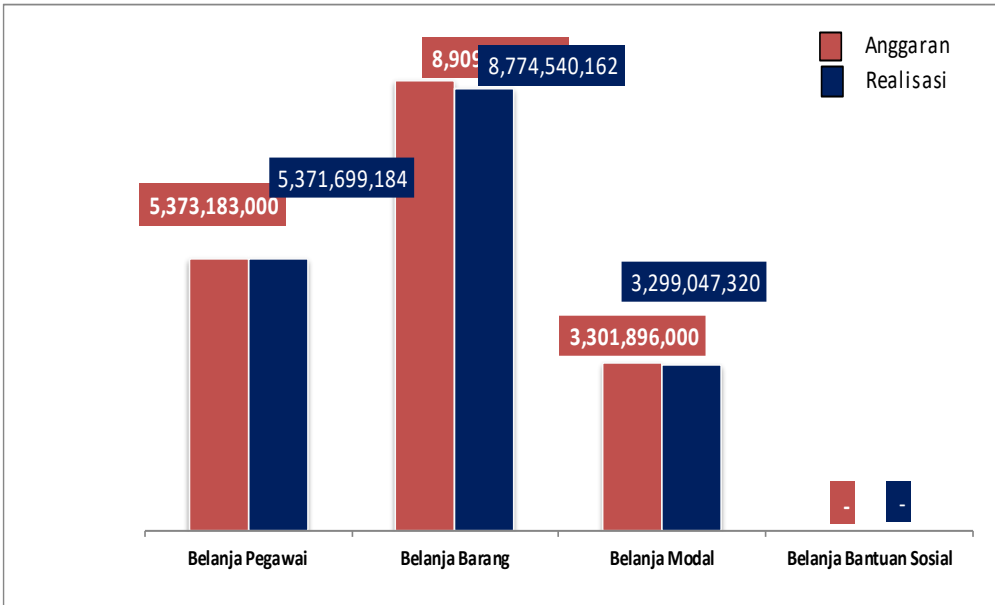
2024.

18. Revisi XVIII merupakan revisi pemutakhiran data POK (KPA) untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas belanja sesuai surat usulan revisi anggaran nomor B.2178/LKKPN/RC.420/XII/2024 tanggal 24 Desember 2024.
19. Revisi XIX merupakan revisi pemutakhiran data POK (KPA) untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas belanja sesuai surat usulan revisi anggaran nomor B.2189/LKKPN/RC.420/XII/2024 tanggal 27 Desember 2024.

Secara umum anggaran DIPA LKKPN Pekanbaru bersumber dari Rupiah Murni (RM) senilai Rp13.894.247.000,- dengan rincian belanja pegawai senilai Rp5.373.183.000,- dengan realisasi belanja pegawai sebesar Rp5.371.699.184,- . Belanja barang senilai Rp7.947.247.000,- dengan realisasi belanja barang senilai Rp7.827.333.722,- dan belanja modal senilai Rp664.000.000,- dengan realisasi belanja modal senilai Rp661.216.501,- dan anggaran belanja yang bersumber dari PNPB senilai Rp3.600.000.000,- dengan rincian belanja barang senilai Rp962.104.000,- dengan realisasi belanja barang senilai Rp947.206.440,- dan belanja modal senilai Rp2.637.896.000,- dengan realisasi belanja modal senilai Rp2.637.830.819,-

Uraian	2024	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	18,203,000	18,203,000
Jumlah Pendapatan	18,203,000	18,203,000
Belanja		
Belanja Pegawai	5,283,000,000	5,373,183,000
Belanja Barang	8,909,351,000	8,909,351,000
Belanja Modal	3,301,896,000	3,301,896,000
Belanja Bantuan Sosial	-	-
Jumlah Belanja	17,494,247,000	17,584,430,000

Secara visualisasi perbandingan realisasi anggaran dan pagu anggaran satker LKKPN Pekanbaru dapat diliat pada grafik dibawah ini :



Realisasi
Pendapatan
Rp164.934.448,-

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 atau Audited adalah sebesar Rp164.934.448,- atau mencapai 906.08 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp18.203.000,-. Pendapatan Satker LKKPN Pekanbaru terdiri dari Pendapatan Penerimaan Pajak sebesar Rp0,- dan Penerimaan Negara Bukan Pajak Rp164.934.448,- dengan rincian sebagai berikut:

- 1. Akun 425131 (pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan mengalami penurunan senilai 0.87% hal ini dikarenakan pada tahun 2023 adanya penambahan perhitungan pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan sesuai LHP Kinierja TA 2022 s.d 2023 Nomor T.108/ITJ.3/HP.110/III/2023.
- 2. Akun 425629 (Pendapatan jasa kelautan dan perikanan lainnya) mengalami kenaikan sebanyak 154.86% atau senilai Rp132.420.000,- dibandingkan tahun 2023. hal ini dikarenakan penerimaan akun 425629 sudah berlaku tarif normal.
- 3. Akun 425912 (Penerimaan kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang Lalu) senilai 189,57% bersumber dari pengembalian kelebihan pembayaran atas pekerjaan pemeliharaan jalan dan komplek kantor/paving blok an. CV

Rihandi Kartika Perkasa senilai Rp713.180,-, selanjutnya pengembalian belanja berupa kekurangan setor pajak kegiatan pembuatan dan pemasangan papan informasi Pieh dan Anambas dan kegiatan Pemeliharaan pagar kantor dan gerbang gapura kantor senilai Rp1.855.653,- sesuai LHP Kinerja TA 2023 s.d 2024 Nomor T.127/ITJ/HP.110/III/2024 tanggal 14 Maret 2024.

4. Akun 425911 bersumber dari pengembalian kelebihan bayar belanja pegawai berupa tunjangan kinerja pegawai LKKPN Pekanbaru dengan rincian 4 (empat) orang pegawai dikarenakan cuti yang tidak terpotong tunjangan kinerjanya dan 5 (lima) orang pegawai yang terlambat namun belum dipotong tunjangan kinerjanya sesuai LHP Kinerja TA 2023 s.d 2024 Nomor T.127/ITJ/HP.110/III/2024 tanggal 14 Maret 2024.
5. Akun 425811 pendapatan yang bersumber dari denda keterlambatan pembangunan prasarana layanan pulau Pieh senilai Rp25.483.402 sesuai dengan SPK nomor 148LKKPN/PPK.Tender/VI/2024 tanggal 5 Juni 2024 dan BAST nomor : 213/LKKPN/PPK.E-Purchasing/IX/2024 tanggal 17 September 2024 an. CV. Sarana Sumber Rezeki.

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2024		%
	Anggaran	Realisasi	
Penerimaan Pajak	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	18,203,000	164,934,448	906.08
Jumlah	18,203,000	164,934,448	906.08

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak audited TA 2024 mengalami penurunan (61.75) persen dibandingkan TA 2023. Hal ini disebabkan oleh penurunan nilai pendapatan dari penjualan BMN pada tahun 2024 dibandingkan tahun 2023 dikarenakan pada tahun 2023 adanya pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin berupa kapal dan Alat Olah Data senilai Rp373.962.395, sementara pada tahun 2024 tidak ada. Secara umum Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya

mengalami peningkatan. Meningkatnya pelayanan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Satker LKKPN Pekanbaru sebesar 154.86 persen. Selain itu, Satker LKKPN Pekanbaru mengalami kenaikan pendapatan penerimaan kembali belanja barang tahun anggaran yang lalu sebesar 189.57 persen. Selain itu, pada Satker LKKPN Pekanbaru terdapat pendapatan penerimaan kembali belanja barang tahun anggaran yang lalu sebesar Rp2.568.833,-, dan terdapat juga pendapatan denda penyelesaian pekerjaan pemerintah sebesar Rp25.483.402,- sesuai BAST Nomor: Berita Acara Serah Terima nomor 259/LKKPN/PPK.E.Purchasing/X/2024 tanggal 18 Oktober 2024.

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2024 dan 2023

URAIAN	2024	2023	%
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	373,962,395	(100.00)
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	4,342,968	4,381,274	(0.87)
Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya	132,420,000	51,958,750	154.86
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	2,568,833	887,110	189.57
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	119,245	-	-
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	25,483,402	-	-
Jumlah	164,934,448	431,189,529	(61.75)

Realisasi
Belanja Negara
Rp17.445.286.
666,-

B.2 Belanja

Realisasi Belanja pada Laporan Keuangan Audited TA 2024 adalah sebesar Rp17,445,286,666 atau 99.21 % dari anggaran belanja sebesar Rp.17,584,430,000 Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2024

URAIAN	Catatan	TA 2024		% thd Angg	TA 2023
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
Belanja Pegawai	B.2.1	5,373,183,000	5,371,699,184	99.97	4,868,460,815
Belanja Barang	B.2.2	8,909,351,000	8,774,540,162	98.49	7,122,791,322
Belanja Modal	B.2.3	3,301,896,000	3,299,047,320	99.91	534,782,000
Belanja Bantuan Sosial	B.2.4	-	-	-	-
JUMLAH BELANJA		17,584,430,000	17,445,286,666	99.21	12,526,034,137

Secara umum anggaran DIPA LKKPN Pekanbaru bersumber dari Rupiah Murni (RM) senilai Rp13.894.247.000,- dengan rincian belanja pegawai senilai Rp5.373.183.000,- dengan realisasi belanja pegawai sebesar Rp5.371.699.184,- . Belanja barang senilai Rp7.947.247.000,- dengan realisasi belanja barang senilai Rp7.827.333.722,- dan belanja modal senilai Rp664.000.000,- dengan realisasi belanja modal senilai Rp661.216.501,- dan anggaran belanja yang bersumber dari PNBPNP senilai Rp3.600.000.000,- dengan rincian belanja barang senilai Rp962.104.000,- dengan realisasi belanja barang senilai Rp947.206.440,- dan belanja modal senilai Rp2.637.896.000,- dengan realisasi belanja modal senilai Rp2.637.830.819,-

Dibandingkan dengan TA 2023, Realisasi Belanja *Audited* TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 40,25% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Belanja Pegawai

- Kenaikan beban gaji di tahun 2024 senilai Rp5.371.699.184,- dan di tahun 2023 senilai Rp4.868.460.815,- dikarenakan adanya penambahan pegawai fungsional APJK Pegawai Pemerintah Perjanjian Kontrak (P3K) pada tahun 2024 an. Siti Komariah. Penambahan belanja akun 51 dari semula Rp5.283.000.000,- menjadi Rp5.373.183.000,- atau penambahan senilai Rp90.183.000,-.
- Nilai Belanja Gaji memiliki selisih antara LRA Rp5.371.885.472,- dengan nilai Beban di LO senilai Rp5.371.699.184,- selisih antara LRA dan LO senilai Rp186.288 yang merupakan pengembalian belanja pegawai an Muhammad Faisal Sidik dan pembulatan gaji PNS.
- Ada pengembalian belanja pegawai senilai Rp186.288,- yang bersumber dari belanja pembulatan gaji PNS (511119) senilai Rp1.238,- dan Belanja Tunjangan Umum

PNS (511151) senilai Rp185.050,- merupakan pengembalian tunjangan umum an. Muhammad Faisal Sidik, S.Pi dikarenakan pengajuan gaji bulan Januari pada bulan Desember, sementara pada bulan Januari tersebut yang bersangkutan telah diangkat menjadi JFT Perencana dan sudah mendapatkan atau dibayarkan tunjangan jabatan fungsional

- Selanjutnya pada tahun anggaran 2024 juga adanya penyesuaian tarif PPH 21 pada tunjangan kinerja bulan November dan Desember 2024 pada Satker 477456, sehingga belanja pegawai mengalami kekurangan yang mengakibatkan ada 9 (sembilan) orang pegawai yang dibayarkan tunjangan kinerjanya pada tahun anggaran 2025 an. Sri Mulia Hamonangan, A.Md dkk.

2. Kenaikan belanja Barang tidak banyak perubahan, kenaikan belanja barang dikarenakan ada peningkatan anggaran belanja jasa lainnya dalam kegiatan LKKPN Pekanbaru pada tahun 2024 yakni berupa :

- Belanja Jasa Lainnya Petugas Layanan Informasi senilai Rp.33.000.000,-
- Belanja Jasa Lainnya Pengembangan dan Sertifikasi SMAP ISO 37001:2016 senilai Rp.50.000.000,-
- Belanja Jasa Lainnya Iklan Layanan/Endorsement/Publikasi senilai Rp.12.600.000,- dan Paket Pembuatan Video Potensi Kawasan Pulau Pieh dan Anambas senilai Rp.200.000.000,-
- Belanja Jasa Lainnya Desain Grafis dan Video Editor senilai Rp.66.000.000,-
- Belanja jasa Lainnya Pembuatan, Perbaikan dan Pemasangan Papan Informasi Kawasan 5 Paket senilai Rp.215.275.000,-
- Belanja Jasa Lainnya Mouring Bouy 1 Paket senilai Rp.60.009.000,-
- Belanja Jasa Lainnya *Therapy Hyperbaric Chamber* dan Docking Kapal KN Sniper Dolphin senilai Rp.134.860.000,-
- Belanja Jasa Lainnya Pembuatan Video Dokumenter

Kampanye Aksi Bersih Sampah senilai Rp.46.906.000,- peningkatan anggaran belanja jasa lainnya tersebut untuk meningkatkan kinerja organisasi dalam hal keterbukaan informasi publik, pelayanan prima, akuntabilitas organisasi.

- selanjutnya ada selisih antara belanja barang di LRA dan Beban LO pada pelaporan LK *Audited* tahun 2024 senilai Rp11.469.118,- yang merupakan belanja akrual yang meliputi belanja jasa listrik dan telepon pada awal tahun 2024.,

3. Realisasi belanja modal *Audited* TA 2024 terdapat mutasi tambah aset gedung dan bangunan dengan rincian sebagai berikut :

a. Penambahan Nilai Aset Gedung dan Bangunan

Terdapat penambahan nilai aset berupa renovasi gedung kantor (Bangunan Gedung Kantor Permanen (NUP 1) sebesar Rp397.223.501,-, yang terdiri dari :

- Paket Pengadaan Perencanaan Renovasi Gedung Kantor melalui Surat Perintah Kerja nomor 37/LKKPN/PPK.PL/I/2024 tanggal 16 Januari 2024 dan Berita Acara Serah Terima nomor 123.B/LKKPN/PPK.PL/V/2024 tanggal 12 Mei 2024 dengan nilai pengadaan sebesar Rp29.899.515,-;
- Paket Pengadaan Pembangunan Renovasi Gedung Kantor melalui Surat Pesanan nomor 85/LKKPN/PPK.E-Purchasing/III/2024 tanggal 14 Maret 2024 dan Berita Acara Serah Terima nomor 122/LKKPN/PPK.E-Purchasing/V/2024 tanggal 12 Mei 2024 dengan nilai pengadaan sebesar Rp347.355.086,-; dan
- Paket Pekerjaan Pengawasan Renovasi Gedung Kantor melalui Surat Perintah Kerja nomor 86/LKKPN/PPK.PL/III/2024 tanggal 14 Maret 2024 dan Berita Acara Serah Terima nomor 123.A/LKKPN/PPK.PL/V/2024 tanggal 12 Mei 2024 dengan nilai kontrak sebesar Rp19.968.900,-.

b. Penambahan Gedung dan Bangunan

Terdapat penambahan aset berupa 1 unit Bangunan Gedung Kantor Lainnya NUP 1) senilai Rp2.637.830.819,- yang mana diperuntukkan untuk kantor pelayanan Kawasan Konservasi Pulau Pieh yang berlokasi di dalam kawasan Pelabuhan Perikanan Samudra Bungus, Kota Padang, Sumatra Barat.

Penambahan aset ini dilakukan melalui transaksi penyelesaian pembangunan dengan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) pada Aset KDP berupa Gedung dan Bangunan dalam pengerjaan NUP 11. Nilai penambahan aset ini terdiri dari :

- Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi DED Pembangunan Prasarana Layanan Kawasan Konservasi Pieh melalui Surat Perjanjian nomor 64/LKKPN/PPK.Tender/II/2024 tanggal 22 Februari 2024 dan Berita Acara Serah Terima nomor 268/LKKPN/PPK.Tender/X/2024 tanggal 23 Oktober 2024 dengan nilai pengadaan sebesar Rp204.500.000,-;
- Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Prasarana Layanan Kawasan Konservasi Pulau Pieh melalui Surat Perjanjian nomor 148/LKKPN/PPK.E-Purchasing/VI/2024 tanggal 05 Juni 2024 dan Berita Acara Serah Terima nomor 259/LKKPN/PPK.E.Purchasing/X/2024 tanggal 18 Oktober 2024 dengan nilai pengadaan sebesar Rp2.123.616.795,-;
- Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi Pekerjaan pengawasan Pembangunan Prasarana Layanan Kawasan Konservasi Pulau Pieh nomor 144/LKKPN/PPK.Tender/VI/2024 tanggal 05 Juni 2024 dan Berita Acara Serah Terima nomor 262/LKKPN/PPK.Tender/X/2024 tanggal 18 Oktober 2024 dengan nilai pengadaan sebesar Rp155.042.580,-;

- Pengelola Teknis Kegiatan dalam proses pengadaan Prasarana Layanan Kawasan Konservasi Pulau Pieh yang terdiri dari biaya perjalanan dan honor, sebesar Rp154.671.444
- c. Pada Laporan Keuangan *Audited* tahun 2024 adanya penambahan aset berupa alat angkut dengan rincian sebagai berikut :
- Saldo Awal per 1 Januari 2024 pada Alat Angkutan sebanyak 27 Unit senilai Rp4.834.061.691,-. Pada periode TA 2024 terdapat perubahan nilai unit tanpa mengubah jumlah unit, yakni penambahan nilai peralatan dan mesin pada Kapal Pengawas Perikanan NUP 3 sebesar Rp263.993.000,- berupa penambahan 1 (satu) Yamaha 200 PK Mesin Tempel 200A ETX dan 1 (satu) Yamaha Generator Set EF 5500 EW berdasarkan Surat Pesanan (SP) nomor 72/LKKPN/PPK.E-Purchasing/II/2024 tanggal 29 Februari 2024 dan Berita Acara Serah Terima nomor 101/LKKPN.PPK.E-Purchasing/III/2024 tanggal 25 Maret 2024, serta penambahan wiper dan kaca kapal senilai Rp6.993.000,- sehingga saldo per 31 Desember 2024 *Audited* adalah 27 unit, senilai Rp5.098.054.691,-.

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	5,371,699,184	4,868,460,815	10.34
Belanja Barang	8,774,540,162	7,122,791,322	23.19
Belanja Modal	3,299,047,320	534,782,000	516.90
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	17,445,286,666	12,526,034,137	39.27

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai *Audited* TA 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp5.371.699.184 dan Rp4.868.460.815. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja *Audited* TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 10,34 persen dari TA 2023. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Adanya penambahan pegawai dalam rangka mendukung program maupun kegiatan dalam beberapa tahun mendatang. Kenaikan beban gaji di tahun 2024 senilai Rp5.371.699.184,- dan di tahun 2023 senilai Rp4.868.460.815,- dikarenakan adanya penambahan pegawai fungsional APJK Pegawai Pemerintah Perjanjian Kontrak (P3K) pada tahun 2024 an. Siti Komariah. Penambahan belanja akun 51 dari semula Rp5.283.000.000,- menjadi Rp5.373.183.000,- atau penambahan senilai Rp90.183.000,-
2. Selanjutnya pada tahun anggaran 2024 juga adanya penyesuaian tarif PPH 21 pada tunjangan kinerja bulan November dan Desember 2024 pada Satker 477456, sehingga belanja pegawai mengalami kekurangan yang mengakibatkan ada 9 (sembilan) orang yang dibayarkan tunjangan kinerjanya pada tahun anggaran 2025.

Perbandingan Belanja Pegawai TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji Pokok PNS	1,862,834,500	1,652,557,900	12.72
Belanja Pembulatan Gaji PNS	29,364	31,407	(6.50)
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	149,967,570	128,426,380	16.77
Belanja Tunj. Anak PNS	39,483,228	35,166,438	12.28
Belanja Tunj. Struktural PNS	12,600,000	12,600,000	-
Belanja Tunj. Fungsional PNS	188,160,000	174,660,000	7.73
Belanja Tunj. PPh PNS	10,602,607	648,350	1,535.32
Belanja Tunj. Beras PNS	110,295,660	106,529,820	3.54
Belanja Uang Makan PNS	217,560,000	228,875,000	(4.94)
Belanja Tunjangan Umum PNS	37,370,000	41,255,000	(9.42)
Belanja Uang Lembur	46,166,000	140,829,000	(67.22)
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	2,600,413,650	2,346,882,156	10.80
Belanja Gaji Pokok PPPK	38,443,200	0	
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	830	-	
Belanja Tunjangan Beras PPPK	869,040	-	
Belanja Uang Makan PPPk	5,920,000	-	
Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	50,878,823	-	
Belanja Uang Lembur PPPK	291,000	-	
	5,371,885,472	4,868,461,451	10.34
Pengembalian Belanja Pegawai	186288	636	

Belanja
Barang
Rp8.774.540.16
2,-

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Laporan Keuangan Audited 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp8,774,540,162 dan Rp7,122,791,322. Belanja Barang adalah pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan. Realisasi Belanja Barang TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 23.19% dari Realisasi TA 2023.

"Hal ini antara lain disebabkan oleh Kenaikan belanja tidak banyak perubahan, kenaikan belanja barang dikarenakan ada peningkatan anggaran belanja jasa lainnya dalam kegiatan LKKPN Pekanbaru pada tahun 2024 yakni berupa :

1. Belanja Jasa Lainnya Petugas Layanan Informasi senilai Rp.33.000.000,-
2. Belanja Jasa Lainnya Pengembangan dan Sertifikasi SMAP ISO 37001:2016 senilai Rp.50.000.000,-
3. Belanja Jasa Lainnya Iklan Layanan/Endosement/Publikasi senilai Rp.12.600.000,- dan Paket Pembuatan Vidio Potensi Kawasan Pulau Pieh dan Anambas senilai Rp.200.000.000,-

- 4. Belanja Jasa Lainnya Desain Grafis dan Video Editor senilai Rp.66.000.000,-
- 5. Belanja jasa Lainnya Pembuatan, Perbaikan dan Pemasangan Papan Informasi Kawasan 5 Paket senilai Rp.215.275.000,-
- 6. Belanja Jasa Lainnya Mouring Bouy 1 Paket senilai Rp.60.009.000,-
- 7. Belanja Jasa Lainnya Therapy Hyperbaric Chamber dan Docking Kapal KN Sniper Dolphin senilai Rp.134.860.000,-
- 8. Belanja Jasa Lainnya Pembuatan Video Dokumenter/Padcast Kampanye Aksi Bersin Sampah senilai Rp.46.906.000,-

Peningkatan anggaran belanja jasa lainnya tersebut untuk meningkatkan kinerja organisasi dalam hal keterbukaan informasi publik, pelayanan prima, akuntablilitas organisasi.

selanjutnya ada selisih antara belanja di LRA dan Beban LO pada pelaporan Laporan Keuangan *Audited* tahun 2024 senilai Rp11.469.118,- yang merupakan belanja akrual yang meliputi belanja jasa listrik dan tlp pada awal tahun 2024.

Realisasi Belanja Barang Laporan Keuangan *Audited* TA 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp8.774.540.162,- dan Rp7.122.791.322,-. Realisasi Belanja Barang *Audited* TA 2024 mengalami kenaikan 0,23% dari Realisasi Belanja Barang TA 2023. Hal ini antara lain disebabkan oleh meningkatnya belanja perjalanan dinas dan belanja jasa sepanjang tahun 2024.

Perbandingan Belanja Barang TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A.2023	NAIK /TURUN (%)
Belanja Barang Operasional	619,023,532	1,140,078,974	(0.457)
Belanja Barang Non Operasional	1,384,019,167	1,425,256,222	(0.029)
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	50,859,523	75,046,263	(0.322)
Belanja Jasa	3,210,965,188	1,028,116,131	2.123
Belanja Pemeliharaan	426,313,157	733,979,137	(0.419)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	2,883,849,595	2,520,321,695	0.144
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/	199,510,000	199,992,900	(0.002)
Jumlah Belanja kotor	8,774,540,162	7,122,791,322	0.232
Pengembalian Belanja	-	-	
Jumlah Belanja	8,774,540,162	7,122,791,322	0.232

Belanja Modal
Rp3.299.047.320

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal per tanggal 31 Desember 2024 atau pelaporan keuangan *Audited* dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp3,299,047,320 dan Rp534,782,000. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2024 *Audited* mengalami kenaikan sebesar 516.90% dibandingkan TA 2023 disebabkan oleh Realisasi Belanja Modal tahun 2024 mengalami kenaikan dibandingkan realisasi tahun 2023, hal ini dikarenakan Belanja Modal tahun 2024 *Audited* adanya penambahan fisik terdapat penambahan nilai aset berupa renovasi gedung kantor (Bangunan Gedung Kantor Permanen NUP 1) sebesar Rp397.223.501,- dan penambahan KDP gedung dan bangunan dalam pengerjaan NUP 11 sebesar Rp1.924.586.267. Dan penambahan nilai aset peralatan dan mesin terdapat perubahan nilai unit tanpa mengubah jumlah unit, yakni penambahan nilai peralatan dan mesin pada Kapal Pengawas Perikanan NUP 3 sebesar Rp257.000.000,- berupa penambahan 1 (satu) Yamaha 200 PK Mesin Tempel 200A ETX dan 1 (satu) Yamaha Generator Set EF 5500 EW berdasarkan Surat Pesanan (SP) nomor 72/LKKPN/PPK.E-Purchasing/II/2024 tanggal 29 Februari 2024 dan Berita Acara Serah Terima nomor 101/LKKPN.PPK.E-Purchasing/III/2024 tanggal 25 Maret 2024.

Pada Laoran Keuangan *Audited* tahun 2024 terdapat penambahan belanja modal berupa penambahan nilai aset sebesar Rp397.223.501,- yang merupakan bangunan gedung kantor permanen dengan rincian :

- a. Paket Pengadaan Perencanaan Renovasi Gedung Kantor melalui Surat Perintah Kerja nomor 37/LKKPN/PPK.PL/I/2024 tanggal 16 Januari 2024 dan Berita Acara Serah Terima nomor 123.B/LKKPN/PPK.PL/V/2024 tanggal 12 Mei 2024 dengan

nilai pengadaan sebesar Rp29.899.515,-;

- b. Paket Pengadaan Pembangunan Renovasi Gedung Kantor melalui Surat Pesanan nomor 85/LKKPN/PPK.E-Purchasing/III/2024 tanggal 14 Maret 2024 dan Berita Acara Serah Terima nomor 122/LKKPN/PPK.E-Purchasing/V/2024 tanggal 12 Mei 2024 dengan nilai pengadaan sebesar Rp347.355.086,-; dan
- c. Paket Pekerjaan Pengawasan Renovasi Gedung Kantor melalui Surat Perintah Kerja nomor 86/LKKPN/PPK.PL/III/2024 tanggal 14 Maret 2024 dan Berita Acara Serah Terima nomor 123.A/LKKPN/PPK.PL/V/2024 tanggal 12 Mei 2024 dengan nilai kontrak sebesar Rp19.968.900,-.

Selanjutnya adanya penambahan asset sebanyak 1 unit gedung dengan nilai sebesar Rp2.637.830.819,- yang merupakan bangunan gedung kantor lainnya dengan rincian sebagai berikut:

- a. Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi DED Pembangunan Prasarana Layanan Kawasan Konservasi Pieh melalui Surat Perjanjian nomor 64/LKKPN/PPK.Tender/II/2024 tanggal 22 Februari 2024 dan Berita Acara Serah Terima nomor 268/LKKPN/PPK.Tender/X/2024 tanggal 23 Oktober 2024 dengan nilai pengadaan sebesar Rp204.500.000,-;
- b. Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Prasarana Layanan Kawasan Konservasi Pulau Pieh melalui Surat Perjanjian nomor 148/LKKPN/PPK.E-Purchasing/VI/2024 tanggal 05 Juni 2024 dan Berita Acara Serah Terima nomor 259/LKKPN/PPK.E.Purchasing/X/2024 tanggal 18 Oktober 2024 dengan nilai pengadaan sebesar Rp2.123.616.795,-;
- c. Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi Pekerjaan pengawasan Pembangunan Prasarana Layanan Kawasan Konservasi Pulau Pieh nomor 144/LKKPN/PPK.Tender/VI/2024 tanggal 05 Juni 2024 dan Berita Acara Serah Terima nomor 262/LKKPN/PPK.Tender/X/2024 tanggal 18 Oktober 2024

dengan nilai pengadaan sebesar Rp155.042.580,-;

- d. Pengelola Teknis Kegiatan dalam proses pengadaan Prasarana Layanan Kawasan Konservasi Pulau Pieh yang terdiri dari biaya perjalanan dan honor, sebesar Rp154.671.444,-

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Audited TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A.2023
Belanja Modal Tanah	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	263,993,000	534,782,000
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3,035,054,320	-
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-
Belanja Modal Lainnya	-	-
	-	-
Jumlah Belanja kotor	3,299,047,320	534,782,000
Pengembalian Belanja	-	-
Jumlah Belanja	3,299,047,320	534,782,000

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah per tanggal 31 Desember 2024 Audited dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi tersebut pada TA 2024 sebesar 0,00% dibandingkan TA 2023 . Hal ini disebabkan oleh Pada tahun 2024 Audited tidak ada realisasi belanja modal tanah, hal ini sama dengan tahun 2023 tidak ada belanja modal tanah.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A 2023	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	0	0	
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	0	0	
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	0	0	
Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	0	0	
Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	0	0	
Jumlah Belanja Kotor	0	0	
Pengembalian Belanja Modal	-	-	
Jumlah Belanja	0	0	

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per tanggal 31 Desember 2024 Audited dan 2023 masing-masing sebesar Rp263,993,000 dan Rp534,782,000, mengalami kenaikan

sebesar 0.00 % bila dibandingkan dengan realisasi TA 2023. Hal ini disebabkan oleh Kenaikan realisasi belanja modal peralatan dan mesin di tahun 2024 dikarenakan adanya belanja penambahan nilai peralatan dan mesin berupa pembelian mesin tempel 200 PK seri 200ETX untuk Kapal Monitoring TWP Pieh Sniper Dolpin dan 1 set generator Yamaha EF5500EFW berdasarkan Surat Pesanan (SP) nomor 72/LKKPN/PPK.E-Purchasing/II/2024 tanggal 29 Februari 2024 dan Berita Acara Serah Terima nomor 101/LKKPN.PPK.E-Purchasing/III/2024 tanggal 25 Maret 2024 senilai Rp257.000.000,- .

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Penambahan Nilai Peralata	263,993,000		
Jumlah Belanja Kotor	263,993,000	0	
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	263,993,000	0	

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per tanggal 31 Desember 2024 *Audited* dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp3,035,054,320 dan Rp0 Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2024 *Audited* mengalami kenaikan sebesar 0.00% dibandingkan Realisasi TA 2023. Belanja Gedung dan Bangunan ini berasal dari Kenaikan belanja modal gedung dan bangunan di tahun 2024 adalah dengan penambahan :

1. Belanja Modal dan Bangunan senilai Rp1.718.315.968,- yang berasal dari nilai fisik bangunan dan biaya pengelola kegiatan sesuai BAST Termin I Nomor 179/LKKPN/PPK.E-Purchasing/VII/2024 tanggal 15 Juli 2024, BAST Termin II Nomor 197/LKKPN/PPK.E-Purchasing/VII/2024 tanggal 26 Agustus 2024 dan BAST Termin III Nomor 213/LKKPN/PPK.E-Purchasing/IX/2024 tanggal 17 September 2024 berupa belanja pengelola kegiatan

- pembangunan prasarana layanan kawasan konservasi Pieh.
2. Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan senilai Rp206.270.299,- merupakan belanja dari termin 80% sesuai BAST nomor 105/LKKPN/PPK.Tender/IV/2024 tanggal 19 April 2024 dan 5% senilai sesuai BAST nomor 150/LKKPN/PPK.Tender/V/2024 tanggal 5 Juni 2024 pekerjaan perencanaan pembangunan prasarana layanan kawasan konservasi Pieh dan pengelola kegiatan belanja modal perencanaan dan pengawasan.
 3. Belanja penambahan nilai gedung dan bangunan dengan rincian penambahan nilai aset berupa renovasi gedung kantor (Bangunan Gedung Kantor Permanen NUP 1) sebesar Rp397.223.501,-, yang terdiri dari Paket Pengadaan Perencanaan Renovasi Gedung Kantor melalui Surat Perintah Kerja nomor 37/LKKPN/PPK.PL/I/2024 tanggal 16 Januari 2024 dan Berita Acara Serah Terima nomor 123.B/LKKPN/PPK.PL/V/2024 tanggal 12 Mei 2024 dengan nilai pengadaan sebesar Rp29.899.515,-; b. Paket Pengadaan Pembangunan Renovasi Gedung Kantor melalui Surat Pesanan nomor 85/LKKPN/PPK.E-Purchasing/III/2024 tanggal 14 Maret 2024 dan Berita Acara Serah Terima nomor 122/LKKPN/PPK.E-Purchasing/V/2024 tanggal 12 Mei 2024 dengan nilai pengadaan sebesar Rp347.355.086,-; dan c. Paket Pekerjaan Pengawasan Renovasi Gedung Kantor melalui Surat Perintah Kerja nomor 86/LKKPN/PPK.PL/III/2024 tanggal 14 Maret 2024 dan Berita Acara Serah Terima nomor 123.A/LKKPN/PPK.PL/V/2024 tanggal 12 Mei 2024 dengan nilai kontrak sebesar Rp19.968.900,-."

*Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan
TA 2024 dan 2023*

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2,400,885,520	-	-
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan	236,945,299	-	-
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan	397,223,501	-	-
Jumlah Belanja Kotor	3,035,054,320	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	3,035,054,320	-	-

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal, Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal 31 Desember 2024 *Audited* dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0, sebesar 0,00 % dibandingkan Realisasi TA 2023. Hal ini disebabkan Realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan pada tahun 2024 tidak ada penambahan dan pengurangan..

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	%
Belanja Modal Jaringan	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya per tanggal per tanggal 31 Desember 2024 *Audited* dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0, sebesar 0,00 % dibandingkan Realisasi TA 2023. Hal ini disebabkan Pada tahun 2024 tidak ada realisasi belanja modal lainnya pada satker Loka KKPN Pekanbaru..

Belanja
Bantuan
Sosial Rp0,-

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial per tanggal 31 Desember 2024 *Audited* dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan

Rp0. Realisasi tersebut pada TA 2024 sebesar 0,00 % dibandingkan TA 2023. Belanja Bantuan Sosial Pada tahun 2024 tidak ada realisasi belanja barang Sosial pada Satker Loka KKPN Pekanbaru.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Persediaan

Persediaan
Rp829.700

Nilai Persediaan tanggal 31 Desember 2024 *Audited* dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp829,700 dan Rp4,266,180. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2024 *Audited* dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan TA 2024 *Audited* dan 2023

Jenis	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023
Barang Konsumsi	829,700	4,266,180
Bahan untuk Pemeliharaan	-	-
Jumlah	829,700	4,266,180

Persediaan tersebut di atas dalam Saldo awal Januari 2024 Barang Konsumsi adalah Rp4.266.180,- mutasi tambah senilai Rp50.859.523,- terdiri dari pembelian barang persediaan berupa Alat tulis Kantor, Meterai, Kertas HVS, bahan komputer, serta bahan penunjang kegiatan kantor. Mutasi kurang senilai Rp54.296.003,- berupa habis pakai terhadap barang persediaan. Sehingga Saldo barang Konsumsi per 31 Desember 2024 (*Audited*) Rp829.700,-. Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik dengan rincian sebagai berikut :

No	Kode Barang (16 Digit)	Uraian Kode Barang	Satuan	Saldo Sistem	Hasil Opsik	KONDISI Baik/Usang/ Rusak
1	1010301999000052	Lek Stik UHU Sedang	bh	3	3	Baik
2	1010301999000059	rak dokumen meja	buah	1	1	Baik
3	1010302001000003	kertas Hvs 80 gram A4	rim	3	3	Baik
4	1010309001000005	materai 10000	lembar	31	31	Baik
5	1010301999000053	lakban bening	buah	1	1	Baik
6	1010311999000005	obat pembersih lantai	botol	2	2	Baik
7	1010311999000009	kapur barus	bungkus	1	1	Baik
8	1010311999000010	Spon cuci piring	bungkus	1	1	Baik
9	1010311999000011	sabun cuci tangan	bungkus	1	1	Baik
10	1010311999000014	obat pengharum ruangan	botol	1	1	Baik
11	1010311999000015	obat pencuci kain	botol	2	2	Baik
12	1010311999000018	kawat cuci piring	bungkus	1	1	Baik
TOTAL				48	48	

Tanah

Rp5.587.783.737

37

C.2 Tanah

Nilai aset tetap berupa Tanah yang dimiliki per 31 Desember 2024 *Audited* dan 2023 adalah sebesar Rp5,587,783,737 dan Rp5,587,783,737. Nilai Tanah tersebut Saldo tanah pada neraca per 31 Desember 2023 *Audited* adalah seluas 16.400 m2, senilai Rp5.587.783.737,- dan pada *Audited* TA. 2024 tidak terdapat penambahan aset tanah sehingga saldo pada 31 Desember *Audited* TA. 2024 adalah tetap senilai Rp Rp5.587.783.737,-. Mutasi nilai Tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	5,587,783,737
Mutasi tambah:	
Pembelian	0
Mutasi kurang:	
Revaluasi aset	-
Penyitaan pengadilan	0
Saldo per 31 Desember 2024	5,587,783,737

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2024 *Audited* adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah TA 2024

No	Luas m2	Lokasi	Nilai
1	10,000	Jl. Budiluhur Kel. Mentangor Kec. Kulim Pekanbaru	5,470,712,000
2	6,400	Desa Pesisir Timur Kec. Siantan Kab. Kep. Anambas	117,071,737
3			
4			
Jumlah			5,950,000,000

Rincian tanah pada Satker 477456 LKKPN Pekanbaru pada tanggal pelaporan yang dikuasai/digunakan oleh pihak ketiga tidak ada.

Peralatan

dan Mesin
Rp10.632.134.422,-

C.3 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 *Audited* dan 2023 adalah Rp10,632,134,422 dan Rp10,691,594,352. Nilai Peralatan dan Mesin dan mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan

sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	10,691,594,352
Mutasi tambah:	
Pengembangan Nilai Aset	263,993,000
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	1,899,000
Hibah Barang	0
Transfer Masuk	0
Koreksi tambah	0
Mutasi kurang:	0
Penghentian dari penggunaan	(352,351,930)
Saldo per 31 Desember 2024	10,605,134,422
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	(8,079,651,773)
Nilai Buku per 31 Desember 2024	2,525,482,649

Mutasi transaksi penambahan peralatan dan mesin berupa:

- a. Saldo Awal per 1 Januari 2024 pada Alat Angkutan sebanyak 27 Unit senilai Rp4.834.061.691,-. Pada periode TA 2024 terdapat perubahan nilai unit tanpa mengubah jumlah unit, yakni penambahan nilai peralatan dan mesin pada Kapal Pengawas Perikanan NUP 3 sebesar Rp263.993.000,- berupa penambahan 1 (satu) Yamaha 200 PK Mesin Tempel 200A ETX dan 1 (satu) Yamaha Generator Set EF 5500 EW berdasarkan Surat Pesanan (SP) nomor 72/LKKPN/PPK.E-Purchasing/II/2024 tanggal 29 Februari 2024 dan Berita Acara Serah Terima nomor 101/LKKPN.PPK.E-Purchasing/III/2024 tanggal 25 Maret 2024, serta penambahan wiper dan kaca kapal senilai Rp6.993.000,- sehingga saldo per 31 Desember 2024 *Audited* adalah 27 unit, senilai Rp5.098.054.691,-.
- b. Saldo Awal Komputer Unit dan Peralatan Komputer per 31 Desember 2023 *Audited* adalah 84 unit, senilai Rp985.195.800,-. Sedangkan pada periode *Audited* TA. 2024 terdapat perubahan nilai aset yakni pada notebook NUP 66, yang mana pada barang milik negara tersebut mengalami penambahan nilai aset sebesar Rp1.899.000,- yang berasal dari koreksi pencatatan aset tak berwujud (software) yang kemudian menjadi satu kesatuan dengan notebook tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Perubahan Pencatatan nomor

B.912/LKKPN/KP.120/V/2024 tanggal 27 Mei 2024, sehingga saldo akhir per 30 Juni TA.2024 adalah sebanyak 84 unit senilai Rp987.094.800,-.

Saldo Awal per 1 Januari 2024 pada Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga sebanyak 450 Unit senilai Rp1.291.677.100,-. Pada TA. 2024 *Audited* terdapat mutasi kurang sebanyak 58 unit senilai 65.227.660 berupa Penghentian Aset dari Penggunaan. Mutasi kurang merupakan penghentian penggunaan sebuah mesin genset yang sudah dalam kondisi rusak berat direklasifikasi ke dalam Aset Lainnya. Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Laporan Keuangan *Audited* Tahun 2024 ini sebagai berikut :

- a. Saldo Awal per 1 Januari 2024 pada Alat Studio, Alat Komunikasi sebesar 60 unit senilai Rp1.184.740.990,-. Pada TA. 2024 terdapat mutasi kurang sebanyak 13 unit senilai Rp156.561.350,- berupa Penghentian Aset dari Penggunaannya.
- b. Saldo Awal per 1 Januari 2024 pada Alat Kedokteran sebesar 8 unit senilai Rp22.174.000,-. Pada TA. 2024 terdapat mutasi kurang sebanyak 1 unit senilai Rp2.800.000,- berupa Penghentian Aset dari Penggunaannya .
- c. Saldo awal per 1 Januari 2024 pada Alat Laboratorium sebanyak 19 unit senilai Rp366.837.800,-. Pada TA. 2024 terdapat mutasi kurang sebanyak 1 unit senilai Rp426.800,- berupa Penghentian Aset dari Penggunaannya .
- d. Saldo awal per 1 Januari 2024 pada Komputer Unit sebanyak sebanyak 84 unit senilai Rp985.195.800,-. Pada TA. 2024 juga terdapat mutasi kurang sebanyak 6 unit senilai Rp53.426.000,- berupa Penghentian Aset dari Penggunaannya .
- e. Saldo awal per 1 Januari 2024 pada Alat Eksplorasi sebanyak 8 unit senilai Rp40.397.000,-. Pada TA. 2024 terdapat mutasi kurang sebanyak 6 unit senilai

Rp39.737.000,- berupa Penghentian Aset dari Penggunaannya .

Saldo awal per 1 Januari 2024 pada Alat Deteksi, Alat Pelindung, Alat SAR sebanyak 438 unit dengan nilai keseluruhan sebesar Rp1.935.536.411,-. Pada TA. 2024 terdapat mutasi kurang sebanyak 12 unit senilai Rp8.054.120,- berupa Penghentian Aset dari Penggunaannya.

Gedung dan Bangunan **C.4 Gedung dan Bangunan**

Rp7.864.462.320
20

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 *Audited* dan 2023 adalah Rp7,864,462,320 dan Rp4,829,408,000. . Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	4,829,408,000
Mutasi tambah:	
Pengembangan Nilai Aset	347,355,086
Pengembangan Melalui KDP	49,868,415
Penyelesaian Pembangunan dengan KDP	2,637,830,819
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2024	7,864,462,320
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	(799,332,391)
Nilai Buku per 31 Desember 2024 Audited	7,065,129,929

Transaksi penambahan Gedung dan Bangunan berasal dari penambahan gedung tempat kerja berupa Saldo awal per 1 Januari 2024 pada Gedung dan Bangunan sebanyak 6 unit dengan nilai keseluruhan sebesar Rp4.829.408.000,- yang terdiri dari 1 Unit Rumah Negara Gol 1 Type D dan Rumah Negara Gol 1 Type E, 1 unit Bangunan Gedung Kantor Permanen, 1 unit Bangunan Tempat Parkir, 1 unit Gudang, 1 unit Pagar Permanen. Pada periode TA. 2024 terdapat mutasi tambah berupa penambahan nilai aset sebesar Rp397.223.501,- dan penambahan unit sebanyak 1 unit gedung dengan nilai sebesar Rp2.637.830.819,-, dengan rincian sebagai berikut :

a) Rincian mutasi tambah Gedung dan Bangunan:

1. Penambahan Nilai Aset Gedung dan Bangunan

Terdapat penambahan nilai aset berupa renovasi gedung kantor (Bangunan Gedung Kantor Permanen NUP 1) sebesar Rp397.223.501,-, yang terdiri dari 1). Paket Pengadaan Perencanaan Renovasi Gedung Kantor melalui Surat Perintah Kerja nomor 37/LKKPN/PPK.PL/I/2024 tanggal 16 Januari 2024 dan Berita Acara Serah Terima nomor 123.B/LKKPN/PPK.PL/V/2024 tanggal 12 Mei 2024 dengan nilai pengadaan sebesar Rp29.899.515,-; 2). Paket Pengadaan Pembangunan Renovasi Gedung Kantor melalui Surat Pesanan nomor 85/LKKPN/PPK.E-Purchasing/III/2024 tanggal 14 Maret 2024 dan Berita Acara Serah Terima nomor 122/LKKPN/PPK.E-Purchasing/V/2024 tanggal 12 Mei 2024 dengan nilai pengadaan sebesar Rp347.355.086,-; dan 3). Paket Pekerjaan Pengawasan Renovasi Gedung Kantor melalui Surat Perintah Kerja nomor 86/LKKPN/PPK.PL/III/2024 tanggal 14 Maret 2024 dan Berita Acara Serah Terima nomor 123.A/LKKPN/PPK.PL/V/2024 tanggal 12 Mei 2024 dengan nilai kontrak sebesar Rp19.968.900,-.

2. Penambahan Gedung dan Bangunan

Terdapat penambahan aset berupa 1 unit Bangunan Gedung Kantor Lainnya NUP 1) senilai Rp2.637.830.819,-, yang mana diperuntukkan untuk kantor pelayanan Kawasan Konservasi Pulau Pieh yang berlokasi di dalam kawasan Pelabuhan Perikanan Samudra Bungus, Kota Padang, Sumatra Barat.

Penambahan aset ini dilakukan melalui transaksi penyelesaian pembangunan dengan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) pada Aset KDP berupa Gedung dan Bangunan dalam pengerjaan NUP 11. Nilai penambahan aset ini terdiri dari :1). Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi DED Pembangunan Prasarana Layanan Kawasan Konservasi Pieh melalui Surat

Perjanjian nomor 64/LKKPN/PPK.Tender/II/2024 tanggal 22 Februari 2024 dan Berita Acara Serah Terima nomor 268/LKKPN/PPK.Tender/X/2024 tanggal 23 Oktober 2024 dengan nilai pengadaan sebesar Rp204.500.000,-; 2). Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Prasarana Layanan Kawasan Konservasi Pulau Pieh melalui Surat Perjanjian nomor 148/LKKPN/PPK.E-Purchasing/VI/2024 tanggal 05 Juni 2024 dan Berita Acara Serah Terima nomor 259/LKKPN/PPK.E.Purchasing/X/2024 tanggal 18 Oktober 2024 dengan nilai pengadaan sebesar Rp2.123.616.795,-; 3). Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi Pekerjaan pengawasan Pembangunan Prasarana Layanan Kawasan Konservasi Pulau Pieh nomor 144/LKKPN/PPK.Tender/VI/2024 tanggal 05 Juni 2024 dan Berita Acara Serah Terima nomor 262/LKKPN/PPK.Tender/X/2024 tanggal 18 Oktober 2024 dengan nilai pengadaan sebesar Rp155.042.580,-; 4). Pengelola Teknis Kegiatan dalam proses pengadaan Prasarana Layanan Kawasan Konservasi Pulau Pieh yang terdiri dari biaya perjalanan dan honor, sebesar Rp154.671.444,-"

Jalan,Jarin **C.5 Jalan, Irigasi, dan Jaringan**
gan dan

Irigasi Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024
Rp340.000.000 *Audited* dan 2023 adalah Rp.2,966,112,339 dan
Rp.2,966,112,339. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi
dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	2,966,112,339
Mutasi tambah:	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2024	2,966,112,339
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	(2,290,958,106)
Nilai Buku per 31 Desember 2024 Audited	675,154,233

Mutasi tambah:

- Saldo Awal Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember TA. 2023 *Audited* adalah 8 unit, senilai Rp 2.966.112.339,- berupa jalan khusus kompleks, saluran drainage, bak penampung air, saluran air kotor sambungan rumah tangga, instalasi komunikasi Komleks, instalasi penangkal petir manual, dan instalasi generating set. Sedangkan pada periode *Audited* TA. 2024 tidak terdapat perubahan baik jumlah unit dan nilai aset barang milik negara sehingga saldo akhir pada 30 Juni *Audited* TA. 2024 adalah adalah 8 unit, senilai Rp2.966.112.339,-.

Konstruksi
Dalam
Pengerjaan
Rp0

C.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

"Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.477,649,864. Konstruksi Dalam Pengerjaan merupakan aset tetap yang sedang dalam proses pengerjaan atau pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Saldo Awal Kontruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2023 *Audited* senilai Rp 477.649.864,- berupa pengadaan Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan (DED) untuk perencanaan pembangunan gedung kantor TWP Pulau Pieh dan TWP Kepulauan Anambas. Pada periode Triwulan III TA. 2024, terdapat perubahan aset baik secara jumlah maupun nilai, yakni berupa pengadaan Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan (NUP 11) yang mana akan diperuntukkan sebagai Prasarana Layanan Kawasan Konservasi Pulau Pieh, dan berlokasi di dalam Kawasan

Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus, Sumatera Barat. Hingga 30 September 2024, nilai dari KDP tersebut adalah sebesar Rp1.924.586.267,-, yang terdiri dari :

1. Pembayaran termin Paket Pekerjaan DED Pembangunan Prasarana Layanan Kawasan Konservasi Pieh sesuai kontrak nomor 64/LKKPN/PPK.Tender/II/2024 tanggal 22 Februari 2024, dengan nilai kontrak sebesar Rp204.500.000,- dan hingga 30 September 2024 telah dibayarkan sebesar Rp173.825.000,-
2. Pembayaran termin Paket Pengawasan Pembangunan Prasarana Layanan Kawasan Konservasi Pulau Pieh sesuai Surat Perjanjian No.144/LKKPN/PPK.Tender/VI/2024 tanggal 5 Juni 2024 dengan nilai kontrak sebesar Rp155,042.580 dan hingga 30 September 2024 telah terealisasi sebesar Rp46.512.774,-
3. Pembayaran Belanja Modal Berupa Termin I Pembangunan Prasarana Layanan KK Pulau Pieh sesuai SPK no.148/LKKPN/PPK.Tender/VI/2024 tgl 5 Juni 2024, BAPP no.179/LKKPN/PPK.E-Purchasing/VII/2024 tgl 15 Juli 2024, BAP 181/LKKPN/PPK.E-Purchasing/VII/2024 tgl 15 Juli 2024, BAST 180/LKKPN/PPK.E-Purchasing/VII/2024 sebesar Rp424.723.359,-, dan Termin II Pembangunan Prasarana layanan KK Pulau Pieh sesuai SPK 148/LKKPN/PPK.Tender/VI/24 tgl 5 Jun 24, BAPP 196/LKKPN/PPK.E-Purchasing/VIII/24 tgl 26 Agus 24, BAP 198/LKKPN/PPK.E-Purchasing/VIII/24 tgl 26 Agus 24 sebesar Rp637.085.038,- dan Pembayaran Belanja Modal Berupa Termin III Pembangunan Prasarana layanan Kawasan Konservasi Pulau Pieh sesuai BAPP 212/LKKPN/PPK.E-Purchasing/IX/24 tgl 16 Sept 24, BAP 214/LKKPN/PPK.E-Purchasing/IX/24 tgl 17 Sep 24 sebesar Rp530.904.199,-
4. Pengelola Kegiatan sebesar Rp111.535.897,-.
5. Terdapat usulan penghapusan KDP berupa Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan sejumlah 2 NUP (8 dan 9) yakni Masterplan dan DED Kantor TWP Pieh dan Kantor

TWP Kepulauan Anambas dengan total nilai perolehan sebesar Rp477.649.864,- melalui Surat Kepala Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru nomor B.1769/LKKPN/PL.750/X/2023 tanggal 24 Oktober 2023 tentang Usulan Permohonan Penghapusan BMN. Terhadap usulan penghapusan KDP tersebut telah terbit Surat Persetujuan Penghapusan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia nomor S-45/MK.6/KNL.0303/2024 tanggal 29 Mei 2024 dan telah ditindaklanjuti dengan permohonan penerbitan SK Penghapusan melalui surat nomor B.3478/DJPKRL.1/PL.750/VI/2024 tanggal 19 Juni 2024 dan telah terbit SK penghapusan BMN atas KDP tersebut berdasarkan SK Nomor : 738/KEPMEN-KP/SJ/PL.750/2024 tanggal 31 Juli 2024. Mutasi transaksi pada Konstruksi Dalam Pengerjaan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2024	477,649,864
Mutasi tambah:	
Perolehan/Penambahan KDP	24,679,612
Pengembangan KDP	2,663,019,622
	-
	-
Mutasi Kurang:	
Penghapusan/ Penghentian KDP	477,649,864
Reklasifikasi KDP menjadi Barang Jadi	-
	-
	-
Saldo per 31 Desember 2024	2,687,699,234

Akumulasi

C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan

Aset Tetap

Rp11.169.942.270

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 *Audited* dan 2023 adalah masing-masing Rp11,169,942,270 dan Rp10,373,231,919. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Audited TA 2024 dan 2023

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	10,632,134,422	(8,079,651,773)	18,711,786,195
2	Gedung dan Bangunan	7,864,462,320	(799,332,391)	8,663,794,711
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2,966,112,339	(2,290,958,106)	5,257,070,445
4	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
Akumulasi Penyusutan		21,462,709,081	(11,169,942,270)	32,632,651,351

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan Audited Tahun 2024 ini.

Aset Tak
Berwujud
Rp0

C.8 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2024 Audited dan 2023 adalah Rp0 dan Rp1,899,000. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru berupa Software.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Satker LKKPN Pekanbaru berupa *software* yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	1,899,000	
Mutasi tambah:		
Pembelian	-	
Mutasi kurang:	-	
Koreksi Pencatatan	1,899,000	
Saldo per 31 Desember 2024	-	
Akumulasi Amortasi s.d 31 Desember 2024	-	
Nilai Buku per 31 Desember 2024 Audited	-	

Mutasi tambah:

Saldo awal Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023 *Audited* adalah 1 unit dengan nilai Rp1.899.000,-. Pada periode Semester I TA. 2024 terdapat pengurangan aset berupa koreksi pencatatan 1 unit software komputer MS. Office senilai Rp1.899.000,- sesuai dengan Surat Keterangan Perubahan Pencatatan nomor B.912/LKKPN/KP.120/V/2024 tanggal 27 Mei 2024 sehingga saldo per 30 Juni Semester I TA. 2024 *Audited* adalah 0 unit.

C.9 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 *Audited* dan 2023 adalah Rp325,351,930 dan Rp199,500,000. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2023	199,500,000
Mutasi tambah:	
- reklasifikasi dari aset tetap	325,351,930
Mutasi kurang:	
- penggunaan kembali BMN yang dihentikan	199,500,000
- penghapusan BMN	-
Saldo per 31 Desember 2024	325,351,930
Akumulasi Penyusutan	(323,814,570)
Nilai Buku per 31 Desember 2024 Audited	1,537,360

Transaksi penambahan dan pengurangan aset lain-lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo awal Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah pada Laporan Barang Pembantu Pengguna per 01 Januari 2024 sebanyak 1 unit senilai Rp199.500.000,- berupa 1 unit Peta (Map). Pada TA. 2024 terdapat mutasi tambah sebanyak 94 unit dengan nilai keseluruhan sebesar Rp325.351.930,- dan mutasi kurang sebanyak 1 unit dengan senilai Rp199.500.000,- sehingga saldo akhir per 31 Desember 2024 sebanyak 97 unit dengan nilai keseluruhan sebesar Rp325.351.930,-. Mutasi tambah Aset Tetap yang Dihentikan Penggunaannya Dalam

Operasional Pemerintahan berasal dari pencatatan henti guna terhadap BMN yang telah rusak berat berdasarkan Surat Keterangan nomor B.1821/LKKPN/KP.120/X/2024 tanggal 22 oktober 2024. Atas pencatatan henti guna tersebut telah ditindaklanjuti dengan surat usulan permohonan penghapusan nomor B.2014/LKKPN/PL.750/XI/2024 tanggal 28 November 2024, dan juga telah terbit surat Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara dari Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut nomor KPB.370/DJPKRL.1/PL.750/XII/2024 tanggal 19 Desember 2024

Akumulasi
Penyusutan
dan
Amortisasi
Aset
Lainnya
Rp323.814.570

C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2024 *Audited* dan 2023 adalah Rp323,814,570 dan Rp949,500. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Sedangkan Amortisasi Aset Lainnya merupakan akumulasi amortisasi tak berwujud yang mencakup penurunan kapsitas atau masa manfaat yang diakui pemerintah dari sejak diperoleh atau atau dibeli oleh satker. Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Audited

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud			
Software	0	0	0
Jumlah	0	0	0
Aset Lain-lain	325,351,930	(323,814,570)	1,537,360
Jumlah	325,351,930	(323,814,570)	1,537,360

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Utang
kepada
Pihak
Ketiga
Rp50.993.284,-

C.11 Beban yang Masih Harus Dibayar

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 Audited dan 2023 masing-masing sebesar Rp50,993,284 dan Rp11,469,118. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A.2023
Beban Pegawai yang Masih Harus Dibayar	38,164,098	-
Beban Barang yang Masih Harus Dibayar	12,829,186	11,469,118
	-	-
Total	50,993,284	11,469,118

Beban Barang yang masih harus dibayar senilai Rp12.829.186,- yang tercatat Beban Barang yang masih harus dibayar yang merupakan belanja barang langganan daya dan jasa listrik dan internet (akrual) bulan Desember 2024 yang harus dibayarkan di bulan Januari 2025 dan Beban Pegawai

yang Masih harus Dibayar senilai Rp38.164.098,- yang merupakan kekurangan tunjangan kinerja untuk 9 (sembilan) orang pegawai bulan Desember 2024 yang dibayarkan di bulan Januari 2024 an. Sri Mulia Hamonangan, A.Md dkk.

Ekuitas

Rp15.831.924.324,-

C.28 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2024 *Audited* dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp15,831,924,324. dan Rp14,372,562,935. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Pendapatan
PNBP

D.PENJELASAN
OPERASIONAL

ATAS
POS-POS

LAPORAN

Rp162.246.370,-

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 *Audited* dan 2023 adalah sebesar Rp162,246,370 dan Rp430,302,419. Realisasi pendapatan negara bukan pajak mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 62.29. Hal tersebut disebabkan oleh Pendapatan Negara Bukan Pajak satker LKKPN Pekanbaru pada tahun 2024 bersumber dari akun pendapatan dengan rincian sebagai berikut :

1. Akun 425131 (pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan mengalami penurunan senilai 0.87% hal ini dikarenakan pada tahun 2023 adanya penambahan perhitungan pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan sesuai LHP Kinierja TA 2022 s.d 2023 Nomor T.108/ITJ.3/HP.110/III/2023.
2. Akun 425629 (Pendapatan jasa kelautan dan perikanan lainnya) mengalami kenaikan sebanyak 154.86% atau senilai Rp132.420.000,- dibandingkan tahun 2023. hal ini dikarenakan penerimaan akun 425629 sudah berlaku tarif normal.
3. Akun 425811 pendapatan yang bersumber dari denda keterlambatan pembangunan prasarana layanan pulau Pieh senilai Rp25.483.402 sesuai dengan SPK nomor 148LKKPN/PPK.Tender/VI/2024 tanggal 5 Juni 2024 dan BAST nomor : 213/LKKPN/PPK.E-Purchasing/IX/2024 tanggal 17 September 2024 an. CV. Sarana Sumber Rezeki

Terjadi penurunan pendapatan yang disebabkan oleh pada tahun 2023 adanya pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin melalui mekanisme pelelangan berupa kapal dan AOD, sementara di tahun 2024 tidak

ada pendapatan dari pelepasan aset. Selanjutnya adanya penurunan pendaptan dari sewa tanah, gedung, bangunan yang disebabkan oleh adanya penyesuaian nilai sewa di tahun 2023 dan penambahan nilai kekurangan bayar terhadap perhitungan sewa tanah, gedung dan bangunan di tahun 2022.. Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak tersebut adalah sebagai berikut :

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Audited TA 2024 dan 2023

URAIAN	2024	2023	%
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	4,342,968	4,381,274.00	(0.87)
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	373,962,395.00	(100.00)
Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan	132,420,000	51,958,750.00	154.86
Pendapatan Uang Sitaan Hasil Korupsi yang	-	-	-
Pendapatan Uang Pengganti Tindak Pidana	-	-	-
Jumlah	162,246,370.00	430,302,419.00	(62.29)

Selisih pendapatan antara Laporan Realisasi Pendapatan dan Pendapatan pada Laporan Operasional senilai Rp2.688.078,- yang merupakan bersumber dari penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu (425911) senilai Rp119.245,- dan penerimaan kembali belanja barang tahun anggaran yang lalu (425912) senilai Rp2.568.833,- yang tercatat dan diakui sebagai surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya pada Laporan Operasional senilai Rp2.688.078,-

*Beban
Pegawai
Rp5.409.863.282,-*

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 *Audited* dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp5,409,863,282 dan Rp4,845,149,188,-. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang yang ditetapkan

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.. Beban Pegawai Tahun 2024 sebesar 11.66 persen dibandingkan dengan Tahun 2023 disebabkan oleh Kenaikan beban gaji di tahun 2024 senilai Rp5.371.699.184,- dan di tahun 2023 senilai Rp4.868.460.815,- dikarenakan adanya penambahan pegawai fungsional APJK Pegawai Pemerintah Perjanjian Kontrak (P3K) pada tahun 2024 an. Siti Komariah. Penambahan belanja akun 51 dari semula Rp5.283.000.000,- menjadi Rp5.373.183.000,- atau penambahan senilai Rp90.183.000,-.

Nilai Belanja Gaji memiliki selisih antara LRA Rp5.371.885.472,- dengan nilai Beban di LO senilai Rp5.371.699.184,- selisih antara LRA dan LO senilai Rp186.288 yang merupakan pengembalian belanja pegawai an Muhammad Faisal Sidik dan pembulatan gaji PNS.

Selisih Laporan Realisasi Anggaran Rp5.371.699.184,- neto dengan Laporan Operasional senilai Rp5.409.863.282,- yang merupakan belanja akrual yang disebabkan oleh kekurangna tunjangan kinerja bulan Desember 2024 yang dibayarkan pada bulan Januari 2025 untuk 9 (sembilan) orang pegawai.

Ada pengembalian belanja pegawai senilai Rp186.288,- yang bersumber dari belanja pembulatan gaji PNS (511119) senilai Rp1.238,- dan Belanja Tunjangan Umum PNS (511151) senilai Rp185.050,- merupakan pengembalian tunjangan umum an. Muhammad Faisal Sidik, S.Pi dikarenakan pengajuan gaji bulan Januari pada bulan Desember, sementara pada bulan Januari tersebut yang bersangkutan telah diangkat menjadi JFT Perencana

dan sudah mendapatkan atau dibayarkan tunjangan jabatan fungsional

Selanjutnya pada tahun anggaran 2024 juga adanya penyesuaian tarif PPH 21 pada tunjangan kinerja bulan November dan Desember 2024 pada Satker 477456, sehingga belanja pegawai mengalami kekurangan yang mengakibatkan ada 9 (sembilan) orang yang dibayarkan tunjangan kinerjanya pada tahun anggaran 2025.. Rincian Beban Pegawai *Audited* Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Pegawai Audited TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Beban Gaji Pokok PNS	1,862,834,500	1,652,557,900	12.72
Beban Pembulatan Gaji PNS	28,126	30,771	(8.60)
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	149,967,570	128,426,380	16.77
Beban Tunj. Anak PNS	39,483,228	35,166,438	12.28
Beban Tunj. Struktural PNS	12,600,000	12,600,000	-
Beban Tunj. Fungsional PNS	188,160,000	174,660,000	7.73
Beban Tunj. PPh PNS	10,602,607	648,350	1,535.32
Beban Tunj. Beras PNS	110,295,660	106,529,820	3.54
Beban Uang Makan PNS	217,560,000	228,875,000	(4.94)
Beban Tunjangan Umum PNS	37,184,950	41,255,000	(9.87)
Beban Uang Lembur	46,166,000	140,829,000	(67.22)
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	2,638,577,748	2,323,570,529	13.56
Beban Gaji Pokok PPPK	38,443,200	-	-
Beban Pembulatan Gaji PPPK	830	-	-
Beban Tunjangan Beras PPPK	869,040	-	-
Beban Uang Makan PPPK	5,920,000	-	-
Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja P	50,878,823	-	-
Beban Uang Lembur PPPK	291,000	-	-
Jumlah	5,409,863,282	4,845,149,188	11.66

*Beban
Persediaan
Rp54.296.683,
-*

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 *Audited* dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp54,296,003 dan Rp70,582,683,- Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat komsumsi barang-barang yang habis dipakai, termasuk

barang-barang hasil produksi baik dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Beban Persediaan Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 23.07 persen dibandingkan dengan Tahun 2023 disebabkan oleh Penurunan beban persediaan disebabkan karena berkurangnya transaksi belanja persediaan konsumsi pada tahun 2024. Saldo Awal Persediaan Barang habis pakai per 31 Desember 2023 *Audited* senilai Rp.4.266.180,- sedangkan Belanja Persediaan di Laporan Realisasi Anggaran (LRA) senilai Rp50.859.523,-,. LRA mencerminkan anggaran yang direalisasikan untuk persediaan, yaitu pengeluaran yang telah disetujui dan dibelanjakan sesuai anggaran pemerintah. Fokus utama LRA adalah pada pelaksanaan anggaran, sehingga lebih menitikberatkan pada aliran kas dan anggaran terkait persediaan. dengan Beban Persediaan di Laporan Operasional (LO) senilai Rp54.296.003,- LO mencerminkan aktivitas operasional dalam satu periode, termasuk penambahan persediaan berdasarkan transaksi ekonomi, bukan hanya berdasarkan anggaran yang digunakan. Dalam LO, terdapat pengakuan atas persediaan yang telah terjadi selama periode, meskipun mungkin belum terealisasi dalam anggaran. Selisih antara LRA dan LO senilai Rp3.436.480,- . Perbedaan ini bisa terjadi karena pengakuan persediaan dalam LO mencakup transaksi yang belum memengaruhi anggaran secara langsung tetapi telah terjadi secara ekonomi. Dengan Saldo akhir per *Audited* tahun 2024 senilai Rp829.700,-. . Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan Audited TA 2024 dan 2023

URAIAN	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	54,296,003	70,582,683	(23.1)
Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga			
Beban Persediaan Lainnya			
Jumlah	54,296,003	70,582,683	(23.1)

Selisih Beban Persediaan Laporan Realisasi Belanja dan Laporan Operasional senilai Rp3.436.480,- yang merupakan selisih antara saldo awal persediaan bulan Januari 2024 senilai Rp4.266.180,- dan saldo awal Januari 2025 senilai Rp829.700,-.

*Beban Barang
dan Jasa
Rp5.215.367.9
55*

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 *Audited* dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp5,215,367,955 dan Rp3,617,282,030,-

"Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Beban Barang dan Jasa Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 44.18 persen dibandingkan dengan Tahun 2023 disebabkan oleh Secara keseluruhan beban barang dan jasa pada *Audited* mengalami kenaikan 43.82%, hal ini dikarenakan sejalan dengan banyaknya kegiatan LKKPN Pekanbaru pada tahun berjalan. Beban Jasa Lainnya dan Beban Sewa menunjukkan kenaikan terbesar, hal ini dikarenakan pada tahun 2024 adanya sewa kantor TWP Pieh dan kendaraan bermotor roda 4. sementara Beban Honor Output Kegiatan dan Beban Keperluan Perkantoran mengalami penurunan signifikan, mencerminkan efisiensi atau pengalihan prioritas anggaran serta pemberian honor sudah mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Beban Bahan mengalami kenaikan Rp346.048.945 (33,60%), Peningkatan ini mungkin mencerminkan kebutuhan tambahan bahan operasional untuk mendukung aktivitas di tahun 2024. dan Beban

Langganan Daya dan Jasa Lainnya mengalami kenaikan Rp4.424.477 (6,67%) Hal ini dapat disebabkan oleh peningkatan operasional kegiatan di akhir tahun sehingga berkorelasi meningkatnya biaya atau kebutuhan layanan tambahan menjadi meningkat. Beban Sewa mengalami kenaikan Rp279.207.915 (102,02%) Kenaikan yang sangat signifikan ini mungkin mencerminkan penambahan ruang sewa kantor TWP yang baru dan adanya sewa kendaraan bermotor. Beban Jasa lainnya mengalami kenaikan senilai Rp1.844.586.122 (341,71%), Lonjakan besar ini pengeluaran yang jauh lebih besar untuk jasa eksternal untuk mendukung operasional dan kegiatan penunjang tugas dan fungsi LKKPN Pekanbaru di tahun 2024. Beban langgan listrik mengalami kenaikan Rp9.941.272 (9,18%) Peningkatan ini terjadi karena penambahan jam kerja melalui lemburu diakhir tahun dan banyaknya kegiatan rapat sehingga mengakibatkan adanya kenaikan tagihan listrik.

Penurunan Beban Barang dan jasa pada beban keperluan perkantoran mengalami penurunan senilai Rp447.735.642 (-49,31%) Penurunan ini bisa disebabkan oleh efisiensi penggunaan barang perkantoran dan alokasi anggaran yang kurang pada tahun 2024. Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat mengalami penurunan Penurunan: Rp1.641.800 (-17,42%) Mungkin disebabkan oleh digitalisasi dan pengurangan kebutuhan pengiriman fisik. Beban Honor Operasional Satuan Kerja mengalami penurunan Rp45.984.000 (-33,53%) Penurunan ini bisa mencerminkan pengurangan aktivitas yang memerlukan honor operasional dan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Beban Barang Operasional Lainnya mengalami penurunan Rp25.094.000 (-29,56%) serta Beban Honor Output Kegiatan mengalami penurunan Rp374.400.000 (-97,87%) dan Beban Jasa Profesi mengalami penurunan Rp1.587.150 (-2,03%).

Penurunan beban langgan air mengalami penurunan Rp1.419.400 (-93,30%).. Rincian Beban Barang dan Jasa Untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :"

Rincian Beban Barang dan Jasa Audited TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Beban Keperluan Perkantoran	460,306,832	908,042,474	(49.31)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	7,782,700	9,424,500	(17.42)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	91,128,000	137,712,000	(33.83)
Beban Barang Operasional Lainnya	59,806,000	84,900,000	(29.56)
Beban Bahan	1,375,859,167	1,029,810,222	33.60
Beban Honor Output Kegiatan	8,160,000	382,560,000	(97.87)
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	71,696,471	62,468,230	14.77
Beban Sewa	552,874,000	273,666,085	102.03
Beban Jasa Profesi	76,877,600	78,464,750	(2.02)
Jumlah	5,215,367,955	3,617,282,030.00	44.18

Selisih angka pada Laporan Realisasi Anggaran dan Beban pada Laporan Operasional adalah senilai Rp1.360.068,- yang merupakan selisih dari Beban Barang dan jasa di Laporan Operasional senilai Rp5.215.367.955,- dan realisasi anggaran senilai Rp5.214.007.887,-. Nilai Rp1.360.068,- terbentuk dari selisih nilai belanja akrual dari belanja barang yang harus dibayar kan berupa Listrik dan Internet pemakaian bulan Desember 2023 yang dibayarkan di bulan Januari 2024 senilai Rp11.469.118,- dan belanja akrual berupa listrik dan intenet bulan Desember 2024 yang dibayarkan pada Januari 2025 senilai Rp12.829.186,-.

Sehingga selisih belanja akrual yang terjadi senilai Rp1.360.068,- tersebut diakui sebagai beban namun tidak di catat sebagai pembayaran.

Beban
Pemeliharaan
Rp426.313.157
7

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 *Audited* dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp426,313,157 dan Rp709,412,062. "Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban Pemeliharaan Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 39.91 persen dibandingkan dengan Tahun 2023 disebabkan oleh Penurunan beban pemeliharaan dikarenakan adanya pemeliharaan terhadap kondisi aset pada umumnya yang mengalami kerusakan. Rincian Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin senilai Rp256.422.879,- atau turun (7.71 %) dari tahun 2023. Beban pemerliiharaan Gedung dan Bangunan senilai Rp169.890.278,- mengalami penurunan senilai Rp261.684.867,- atau senilai 60.63%, hal ini dikarenakan pada tahun 2024 tidak adanya pemeliharaan gedung dan bangunan yang sudah dilakukan pemeliharaan pada tahun 2023.

Rincian Beban Pemeliharaan untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :"

Rincian Beban Pemeliharaan Audited TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	256,422,879	277,836,917	(7.71)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	169,890,278	431,575,145	(60.63)
	-	-	-
Jumlah	426,313,157	709,412,062	(39.91)

Beban
Perjalanan
Dinas
Rp2.883.849.595

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 *Audited* dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp2,883,849,595 dan Rp2,520,321,695,-. "Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Beban Perjalanan Dinas Tahun 2024

mengalami kenaikan sebesar 14.42 persen disebabkan oleh Ada kenaikan beban perjalanan dinas *Audited* tahun 2024 dibandingkan dengan priode *Audited* tahun 2023. rincian kenaikan ada pada Beban Perjalanan Biasa senilai Rp363.527.900,- atau senilai 14.42%, dengan rincian :

1. Beban perjalanan biasa mengalami kenaikan Rp159.875.370,- atau 8.82% dikarenakan meningkatnya intensitas kegiatan pada tahun 2024 dibandingkan tahun 2023.
2. Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota senilai Rp147.205.000,- atau senilai 32.63% dikarenakan sejalan dengan kegiatan dilapangan yang dimanfaatkan atau yang melibatkan masyarakat pada kegaitan LKKPN Pekanbaru.
3. Beban Perjalanan Dinas paket Meeting Luar Kota senilai Rp.73.547.530,- atau 33.69%. hal ini dikarenakan banyaknya kegiatan LKKPN Pekanbaru mengikuti kegaitan dari pihak luar baik itu dari Eselon I DJPKRL atau dari stakeholders terkait lainnya.
4. sedangkan Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota mengalami penurunan senilai (Rp17.100.000,-) atau (45.24%) hal ini dikarenakan banyaknya kegiatan untuk menghadiri undangan serta diklat dan pelatihan di tahun 2024.. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2024 dan 2023 :

Rincian Beban Perjalanan Dinas Audited TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A.2019	REALISASI T.A. 2023	%
Beban Perjalanan Biasa	1,973,013,695	1,813,138,325	8.82
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	598,305,000	451,100,000	32.63
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	20,700,000	37,800,000	(45.24)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	291,830,900	218,283,370	33.69
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	2,883,849,595.00	2,520,321,695	14.42

untuk
Diserahkan
kepada
Masyarakat
Rp199.510.000
0

Masyarakat

Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 Audited dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp199,510,000 dan Rp199,992,900,- "Beban Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang dan jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 0.24 dibandingkan dengan Tahun 2023 disebabkan oleh Penurunan beban persediaan peralatan dan mesin untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat senilai (Rp.199.430.420,-) atau (49.99%) dikarenakan pada tahun 2024 hanya 2 kelompok penerima bantuan sedangkan pada tahun 2023 ada 3 kelompok penerima bantuan.

Terdapat bantuan pemerintah berupa bantuan KOMPAK yang telah diserahterimakan juga di Semester I TA. 2024 pada Loka KKPN Pekanbaru sebanyak 2 (dua) KOMPAK, antara lain :

1. Gerakan Lokal Penggiat Konservasi Laut (GELORA) KIABU, yang berlokasi di Kecamatan Siantan Selatan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau, dengan No BAST: B.853/LKKPN/PL.450/V/2024 tanggal 14 Mei 2024 senilai Rp127.950.000,- berupa Perlengkapan Selam.
2. Perkumpulan Nelayan Damai Bahari Letung (KUB Damai Bahari), yang berlokasi di Kecamatan Jemaja, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau, dengan No BAST : B.854/LKKPN/PL.450/V/2024 tanggal 14 Mei 2024 senilai Rp71.560.000,- berupa Fish Finder. Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Audited TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	199,510,000	199,992,900	(0.24)
Jumlah	199,510,000	199,992,900	

Beban

Penyusutan

dan Amortisasi

Rp1.118.729.5

46

D.8 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 Audited dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1,118,729,546 dan Rp1,219,888,644.

Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Audited TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	746,272,707	865,834,687	(13.81)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	143,681,676	106,710,742	34.65
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	18,861,981	37,723,963	(50.00)
Beban Penyusutan Irigasi	207,917,702	207,917,702	-
Beban Penyusutan Jaringan	1,226,800	1,226,800	-
Beban Amortisasi Software	-	474,750	(100.00)
Jumah Penyusutan	1,117,960,866	1,219,888,644	(8.36)
	-	-	-
Jumlah Amortisasi	-	-	-
Jumlah	1,117,960,866	1,219,888,644	(8.36)

Surplus dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp677.149.864

D.9 Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Audited Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut: Jumlah Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp-677,149,864 dan Rp0

Rincian Kegiatan Non Operasional Audited TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Beban Kerugian Pelepasan Aset	(677,149,864)	-	-
	-	-	-
Jumlah	(677,149,864.00)	-	-

Surplus dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp2.688.078

D.10 Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Jumlah Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 Audited dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp2,688,078 dan Rp887,110. Surplus tersebut bersumber dari Akun 425912 (Penerimaan kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang Lalu) senilai 189,57% bersumber dari pengembalian kelebihan pembayaran atas pekerjaan pemeliharaan jalan dan komplek kantor/paving blok an. CV Rihandi Kartika Perkasa senilai Rp713.180,-, selanjutnya pengembalian belanja berupa kekurangan setor pajak kegiatan pembuatan dan pemasangan papan informasi Pieh dan Anambas dan kegiatan Pemeliharaan pagar kantor dan gerbang gapura kantor senilai Rp1.855.653,- sesuai LHP Kinierja TA 2023 s.d 2024 Nomor T.127/ITJ/HP.110/III/2024 tanggal 14 Maret 2024. Akun 425911 bersumber dari pengembalian kelebihan

bayar belanja pegawai berupa tunjangan kinerja pegawai LKKPN Pekanbaru dengan rincian 4 (empat) orang pegawai dikarenakan cuti yang tidak terpotong tunjangan kinerjanya dan 5 (lima) orang pegawai yang terlambat namun belum dipotong tunjangan kinerjanya.

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Penerimaan Kembali Beban Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	119,245	-	-
Penerimaan Kembali Beban Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	2,568,833	887,110.00	189.57
	-	-	-
Jumlah	2,688,078.00	887,110	203.02

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp14.372,562.935

E.1 Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas Awal pada tanggal 31 Desember 2024 *Audited* dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.14,372,562,935.00 dan Rp.15,003,777,304.00

Defisit LO
Rp15.820.144.954

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 *Audited* dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.15,820,144,954.00 dan Rp.12,751,439,673.00. Surplus/Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar
Rp0

E.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk 31 Desember 2024 *Audited* dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

Transaksi Antar Entitas
Rp8.355.115.000

E.4 Transaksi Antar Entitas

Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 *Audited* dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.-845,875 dan Rp.62,880,888 yaitu sebagai berikut .

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

E.4.1 Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset pada 31 Desember 2024 *Audited* dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar

Rp.0 dan Rp.0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

E.4.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi untuk 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0.00 dan Rp.0.00. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut:

E.4.3 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi pada 31 Desember 2024 *Audited* dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Koreksi Atas Reklasifikasi merupakan koreksi atasatas reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya.

E.4.4 Selisih Revaluasi Aset

Selisih Revaluasi Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 *Audited* dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0.00 dan Rp.0.00.

E.4.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 *Audited* dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.-845,875 dan Rp.62,880,888.

Koreksi ini Terdapat nilai sebesar Rp103.625,- pada kolom kredit akun Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi di dalam neraca percobaan akrual, yang berasal dari nilai buku atas Software Komputer yang ditambahkan kepada aset tetap berupa Notebook (NUP 66) saat dilakukan transaksi Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah (kode transaksi 204), yang diperoleh dari Rp1.899.000,- (nilai

perolehan awal Software Komputer) dikurangi dengan Rp1.795.375,- (nilai penyusutan software komputer yang sudah dilekatkan dengan Aset Tetap berupa Notebook

Terdapat nilai sebesar Rp949.500,- pada kolom debit akun Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi di dalam neraca percobaan akrual, yang berasal dari nilai penyusutan atas Aset Tak Berwujud berupa Software Komputer (NUP 9), yang dikembalikan kepada nilai aset tersebut pada saat dilakukan transaksi Koreksi Pencatatan (kode transaksi 305).

Berdasarkan Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi senilai Rp.103.625,- di kredit dan Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi senilai Rp.949.500,- di Debit sehingga membentuk nilai (Rp.845.875,-) paa Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi.

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi terjadi karena adanya penambahan nilai aset berupa perubahan nilai aset yakni pada notebook NUP 66, yang mana pada barang milik negara tersebut mengalami penambahan nilai aset sebesar Rp1.899.000,- yang berasal dari koreksi pencatatan aset tak berwujud (software) yang kemudian menjadi satu kesatuan dengan notebook tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Perubahan Pencatatan nomor B.912/LKKPN/KP.120/V/2024 tanggal 27 Mei 2024.

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi per 31 Desember 2024

Jenis Aset Tetap Non Revaluasi	Nilai Koreksi
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	103,625
Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	(949,500)
Jumlah	(845,875.0)

E.4.6 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 *Audited* dan 31 Desember

2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Koreksi Lain-lain merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

Transaksi Antar Entitas

Rp17.280.352.218

E.5 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 Audited dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.17,280,352,218 dan Rp.12,095,379,608. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal Kementerian /Lembaga (KL), antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. terdiri dari :

Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember2024	
Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagikan ke Entitas Lain	17,445,286,666
Diterima dari Entitas Lain	(164,934,448)
Transfer Keluar	-
Transfer Masuk	-
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
	-
Jumlah	17,280,352,218

E.5.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL) / ditagikan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagikan ke Entitas Lain (DKEL) merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2024 Audited, DKEL sebesar Rp 17,445,286,666, sedangkan DDEL sebesar minus Rp 164,934,448

Ekuitas Akhir

Rp15.831.924.324

E.6 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2024 Audited dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.15,831,924,324.00 dan Rp.14,410,598,127.00.

A. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA PER 31 DESEMBER 2024 AUDITED

Telah dilakukan audit kinerja TA 2023-2024 pada LKKPN Pekanbaru oleh Inspektorat sesuai Laporan Hasil Audit (LHA) kinerja TA 2023-2024 nomor T.127/ITJ/HP.110/III/2024 tanggal 14 Maret 2024. dengan temuan :

1. Pengembalian kelebihan pembayaran atas pekerjaan pemeliharaan jalan dan komplek kantor/paving block an. CV.Rihandi Kartika Perkasa senilai Rp.713.180,-
2. Pengembalian belanja berupa kekurangan setor pajak kegiatan pembuatan dan pemasangan papan informasi Pieh dan Anambas, pemeliharaan kantor dan gerbang gapura kantor senilai Rp.1.855.653,-
3. Pengembalian kelebihan pembayaran belanja pegawai berupa tunjangan kinerja an.9 orang pegawai LKKPN Pekanbaru senilai Rp.118.795,-.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

1. Terdapat nilai sebesar Rp949.500,- pada kolom debit akun Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi di dalam neraca percobaan akrual, yang berasal dari nilai penyusutan atas Aset Tak Berwujud berupa Software Komputer (NUP 9), yang dikembalikan kepada nilai aset tersebut pada saat dilakukan transaksi Koreksi Pencatatan (kode transaksi 305).

Terdapat nilai sebesar Rp103.625,- pada kolom kredit akun Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi di dalam neraca percobaan akrual, yang berasal dari nilai buku atas Software Komputer yang ditambahkan kepada aset tetap berupa Notebook (NUP 66) saat dilakukan transaksi Koreksi

Pencatatan Nilai Bertambah (kode transaksi 204), yang diperoleh dari Rp1.899.000,- (nilai perolehan awal Software Komputer) dikurangi dengan Rp1.795.375,- (nilai penyusutan software komputer yang sudah dilekatkan dengan Aset Tetap berupa Notebook.

Terdapat perbedaan nilai “Akumulasi Penyusutan” pada Neraca dengan nilai “Beban Penyusutan dan Amortisasi” pada Laporan Operasional, yang mana pada Neraca senilai Rp572.843.308,- sedangkan pada Laporan Operasional senilai Rp571.047.933,-, dengan nilai selisih sebesar Rp1.795.375,-. Hal ini terjadi dengan kronologis berikut:

2. Pada tanggal 27 Mei 2024 dilakukan transaksi koreksi pencatatan (305) atas BMN Aset Tak Berwujud berupa software komputer NUP 9 dengan nilai perolehan Rp1.899.000,-. Sebelum aset software komputer tersebut dilakukan koreksi pencatatan, akumulasi nilai penyusutan pada aset tersebut adalah sebesar Rp949.500,-. Dan pada saat dilakukan koreksi pencatatan, nilai akumulasi penyusutan tersebut dikembalikan kepada nilai dari software komputer tersebut.
3. Koreksi pencatatan atas software komputer tersebut dimaksudkan agar software tersebut dilekatkan kepada Aset Peralatan dan Mesin berupa Notebook NUP 66 melalui transaksi Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah (204), yang mana pada laporan “History BMN” atas aset Notebook tersebut, dapat dilihat bahwa terjadi penambahan nilai aset senilai Rp1.899.000,- (sama dengan nilai perolehan awal aset software komputer).
4. Kemudian terjadi penyusutan transaksional atas nilai software komputer yang telah melekat pada Notebook NUP 66 tersebut senilai Rp1.795.375,-

(d disesuaikan dengan masa manfaat Notebook NUP 66).

5. Transaksi Koreksi Pencatatan dan Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah ini sesuai dengan Surat Keterangan Perubahan Pencatatan nomor B.912/LKKPN/KP.120/V/2024 tanggal 27 Mei 2024.
6. Terdapat penambahan aset berupa 1 unit Bangunan Gedung Kantor Lainnya NUP 1) senilai Rp2.637.830.819,-, yang mana diperuntukkan untuk kantor pelayanan Kawasan Konservasi Pulau Pieh yang berlokasi di dalam kawasan Pelabuhan Perikanan Samudra Bungus, Kota Padang, Sumatra Barat.

Penambahan aset ini dilakukan melalui transaksi penyelesaian pembangunan dengan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) pada Aset KDP berupa Gedung dan Bangunan dalam pengerjaan NUP 11. Nilai penambahan aset ini terdiri dari :

- a. Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi DED Pembangunan Prasarana Layanan Kawasan Konservasi Pieh melalui Surat Perjanjian nomor 64/LKKPN/PPK.Tender/II/2024 tanggal 22 Februari 2024 dan Berita Acara Serah Terima nomor 268/LKKPN/PPK.Tender/X/2024 tanggal 23 Oktober 2024 dengan nilai pengadaan sebesar Rp204.500.000,-;
- b. Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Prasarana Layanan Kawasan Konservasi Pulau Pieh melalui Surat Perjanjian nomor 148/LKKPN/PPK.E-Purchasing/VI/2024 tanggal 05 Juni 2024 dan Berita Acara Serah Terima nomor 259/LKKPN/PPK.E.Purchasing/X/2024 tanggal 18 Oktober 2024 dengan nilai

pengadaan sebesar Rp2.123.616.795,-;

- c. Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi Pekerjaan pengawasan Pembangunan Prasarana Layanan Kawasan Konservasi Pulau Pieh nomor 144/LKKPN/PPK.Tender/VI/2024 tanggal 05 Juni 2024 dan Berita Acara Serah Terima nomor 262/LKKPN/PPK.Tender/X/2024 tanggal 18 Oktober 2024 dengan nilai pengadaan sebesar Rp155.042.580,-;
- d. Pengelola Teknis Kegiatan dalam proses pengadaan Prasarana Layanan Kawasan Konservasi Pulau Pieh yang terdiri dari biaya perjalanan dan honor, sebesar Rp154.671.444,-

Laporan Capaian Output merupakan Pengukuran capaian kinerja LKKPN Pekanbaru dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi capaian output pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak/aplikasi SAKTI. pada tahun 2024 LKKPN telah berhasil memenuhi seluruh Target Realisasi Volume Output dengan persentase capaian output sebesar 100%.

Pada penetapan anggaran 2024 terdapat anggaran Rupiah Murni sebesar Rp 13.984.430.000 dan anggaran bersumber PNPB sebanyak Rp3.600.000.000 sehingga total pagu LKKPN Pekanbaru Rp 17.584.430.000, namun pagu efektif yang dapat digunakan setelah proses self bloking penghematan anggaran perjalanan dinas menjadi sebesar Rp.17.461.323.000. Realisasi anggaran berdasarkan aplikasi OM-SPAN sebesar Rp.17.445.286.666 (99,21%) sedangkan berdasarkan pagu efektif setelah proses penghematan, persentase realisasi anggaran menjadi sebesar 99,91% secara rinci sebagai berikut :

Kode 04 - Program Ekonomi Pertanian, Kehutanan,

Perikanan, dan Kelautan

Anggaran total program ini mencapai Rp8.984.430.000, dengan realisasi sebesar Rp8.961.499.083, atau 99,74%. Program ini berfokus pada dukungan manajemen untuk internal Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut. Terdapat beberapa layanan utama, termasuk pengelolaan BMN, layanan organisasi dan tata kelola internal, serta layanan perkantoran.

- Layanan BMN (Kode 956): Anggaran Rp65.900.000, realisasi Rp61.314.552 (93,04%). Fokus utamanya adalah penyusunan laporan akhir tahun 2024.
- Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal (Kode 960): Anggaran Rp536.200.000, realisasi Rp535.353.226 (99,84%). Salah satu kegiatan utama adalah studi tiru pembangunan zona integritas menuju WBK.
- Layanan Perkantoran (Kode 994): Anggaran terbesar dalam program ini, yaitu Rp7.734.430.000, telah terealisasi sebesar Rp7.732.426.591 (99,97%). Kegiatan utama mencakup pembayaran gaji dan tunjangan pegawai serta operasional kantor.

Kode 05 - Program Perlindungan Lingkungan Hidup

Program ini memiliki total anggaran Rp8.600.000.000 dengan realisasi Rp8.483.973.871, atau 98,65%. Fokus utamanya adalah perlindungan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati laut.

- Kawasan Konservasi Perairan (Kode 002): Anggaran Rp5.690.856.000, realisasi Rp5.631.207.082 (98,95%). Kegiatan meliputi sosialisasi pengelolaan kawasan konservasi, monitoring zonasi, dan diskusi publik mengenai pengelolaan kawasan konservasi di wilayah Pulau Pieh dan Kepulauan Anambas.
- Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut (Kode 001):

Anggaran Rp872.040.000, dengan realisasi Rp846.980.717 (97,13%). Kegiatan utama adalah penyelesaian laporan kegiatan terkait rekomendasi pengelolaan konservasi.

- Kemitraan Jejaring Konservasi (Kode PEE): Anggaran Rp125.000.000, realisasi Rp124.095.544 (99,28%). Kegiatan ini meliputi penandatanganan perjanjian kerja sama dengan Yayasan Anambas dan forum diskusi di kawasan konservasi Pulau Pieh.

Kode EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal

Layanan ini memiliki alokasi anggaran sebesar Rp247.900.000, dengan realisasi Rp235.181.213 (94,87%). Beberapa kegiatan utama meliputi:

- Perencanaan dan Penganggaran (Kode 952): Anggaran Rp51.000.000, realisasi Rp46.746.384 (91,66%). Fokus utamanya adalah sinkronisasi rencana kegiatan program USAID kolektif tahun ketiga.
- Pemantauan dan Evaluasi (Kode 953): Anggaran Rp132.000.000, realisasi Rp128.700.475 (97,5%). Kegiatan mencakup input data monitoring evaluasi melalui platform eMonev Bappenas dan SAKTI.
- Manajemen Keuangan (Kode 955): Anggaran Rp64.900.000, realisasi Rp59.734.354 (92,04%). Kegiatan utama adalah penyusunan laporan keuangan.

Kode SCC - Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan

Program ini bertujuan meningkatkan kapasitas pengelola kawasan konservasi. Anggaran sebesar Rp700.000.000 terealisasi Rp683.583.027 (97,65%).

- Pengelola Kawasan Konservasi (Kode 001): Anggaran Rp200.000.000, realisasi Rp188.250.933 (94,13%). Kegiatan mencakup bimbingan teknis penerapan pola

keuangan Badan Layanan Umum (BLU).

- Masyarakat Pemanfaat Kawasan Konservasi (Kode 002): Anggaran Rp500.000.000, realisasi Rp495.332.094 (99,07%). Kegiatan ini telah selesai sepenuhnya dengan capaian target 100%.

.

Lampiran I: Rincian Kegiatan Program Prioritas Nasional

Uraian Kegiatan Prioritas Nasional LKKPN Pekanbaru					
FD.2362	Perlindungan Dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Dan Keanekaragaman Hayati Laut				
	Kegiatan	Pagu	Realisasi	%	Sisa Anggaran
	PBW Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan	872,040,000	846,980,717	97.13 %	25,059,283
	PEE Kemitraan	125,000,000	124,095,544	99.28 %	904,456
	QEH Bantuan Kelompok Masyarakat	300,000,000	298,627,955	99.54 %	1,372,045
	RAL Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	362,104,000	352,235,031	97.27 %	9,868,969
	REA Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem	5,690,856,000	5,631,207,082	98.95 %	59,648,918
	REB Konservasi Jenis/Spesies	250,000,000	247,994,778	99.20 %	2,005,222
	SCC Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan	700,000,000	683,583,027	97.65 %	16,416,973
HB.2366	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan				
	PBT Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	300,000,000	299,249,737	99.75 %	750,263

Lampiran 2: Laporan Capaian Output Satker LKKPN Pekanbaru 2024

No	Kegiatan	KRO/RO	Pagu	Realisasi	%	RVRO		PCRO (%)	GAP**	PN
1	2362	PEE001	125,000,000	124,095,544	99.28	3		100	0.72	PN
2	2367	EBD953	132,000,000	128,700,475	97.50	1		100	2.50	Non PN
3	2362	RAL001	362,104,000	352,235,031	97.27	1		100	2.73	Non PN
4	2366	PBT009	300,000,000	299,249,737	99.75	1		100	0.25	PN
5	2362	REA002	5,690,856,000	5,631,207,082	98.95	1302586		100	1.05	PN
6	2362	QEH001	300,000,000	298,627,955	99.54	2		100	0.46	PN
7	2367	EBA994	7,734,430,000	7,732,426,591	99.97	2		100	0.03	Non PN
8	2367	EBB971	400,000,000	397,223,501	99.31	1		100	0.69	Non PN
9	2367	EBD952	51,000,000	46,746,384	91.66	1		100	8.34	Non PN
10	2367	EBA956	65,900,000	61,314,552	93.04	7		100	6.96	Non PN
11	2362	REB001	250,000,000	247,994,778	99.20	1		100	0.80	PN
12	2362	SCC002	500,000,000	495,332,094	99.07	37		100	0.93	Non PN
13	2362	PBW001	872,040,000	846,980,717	97.13	1		100	2.87	PN
14	2362	SCC001	200,000,000	188,250,933	94.13	10		100	5.87	PN
15	2367	EBA960	536,200,000	535,353,226	99.84	1		100	0.16	Non PN
16	2367	EBD955	64,900,000	59,734,354	92.04	1		100	7.96	Non PN

Kode	Uraian	BELANJA			KELUARAN				GAP	Referensi	Keterangan
		Pagu	Realisasi	Persentase	Target	Satuan	Realisasi Volume RO	Progress Capaian			
04	EKONOMI	8,984,430,000	8,961,499,083	99.74%							
03	PERTANIAN KEHUTANAN PERIKANAN DAN KELAUTAN	8,984,430,000	8,961,499,083	99.74%							
WA	Program Dukungan Manajemen	8,984,430,000	8,961,499,083	99.74%							
2367	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut	8,984,430,000	8,961,499,083	99.74%							
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	8,336,530,000	8,329,094,369	99.91%							
956	Layanan BMN	65,900,000	61,314,552	93.04%	7	Layanan	7	100%	6.96%	(00)	penyusunan laporan akhir 2024
960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	536,200,000	535,353,226	99.84%	1	Layanan	1	100%	0.16%	(00)	studi tiru pembangunan zona integritas menuju WBK Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai di LKKPN Pekanbaru
994	Layanan Perkantoran	7,734,430,000	7,732,426,591	99.97%	2	Layanan	2	100%	0.03%	(00)	gaji dan tunjangan pegawai operasional kantor
EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	400,000,000	397,223,501	99.31%							
971	Layanan Prasarana Internal	400,000,000	397,223,501	99.31%	1	Unit	1	100%	0.69%	(00)	kegiatan telah selesai dilaksanakan
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	247,900,000	235,181,213	94.87%							
952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	51,000,000	46,746,384	91.66%	1	Dokumen	1	100%	8.34%	(00)	Sinkronisasi Rencana Kegiatan Program
953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	132,000,000	128,700,475	97.5%	1	Dokumen	1	100%	2.5%	(00)	USAPD dan Monitoring Kawasan Industri Kelautan, evaluasi online eMonev Rancangan dan SAKTI
955	Layanan Manajemen Keuangan	64,900,000	59,734,354	92.04%	1	Dokumen	1	100%	7.96%	(00)	penyusunan laporan keuangan
05	PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP	8,600,000,000	8,483,973,871	98.65%							
04	KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM	8,600,000,000	8,483,973,871	98.65%							
FD	Program Kualitas Lingkungan Hidup	8,300,000,000	8,184,724,134	98.61%							
2362	Perlindungan Dan Pemanfaatan Kaw	8,300,000,000	8,184,724,134	98.61%							
PBW	Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan	872,040,000	846,980,717	97.13%							
001	Rekomendasi Pengelolaan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut	872,040,000	846,980,717	97.13%	1	Rekomendasi Kebijakan	1	100%	2.87%	(00)	penyelesaian laporan kegiatan
PEE	Kemitraan	125,000,000	124,095,544	99.28%							
001	Jejaring dan Kemitraan Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut	125,000,000	124,095,544	99.28%	1	Kesepakatan	3	100%	0.72%	(00)	penandatanganan perjanjian kerja sama dengan masyarakat adat
QEH	Bantuan Kelompok Masyarakat	300,000,000	298,627,955	99.54%							
001	Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi	300,000,000	298,627,955	99.54%	2	Kelompok Masyarakat	2	100%	0.46%	(00)	penyelesaian laporan kegiatan
RAL	Sarana Bidang Kemaritiman Kelautan dan Perikanan	362,104,000	352,235,031	97.27%							
001	Sarana Pendukung Penyelenggaraan	362,104,000	352,235,031	97.27%	1	Unit	1	100%	2.73%	(00)	penyelesaian laporan kegiatan
REA	Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem	5,690,856,000	5,631,207,082	98.95%							
002	Kawasan Konservasi Perairan Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang Operasional	5,690,856,000	5,631,207,082	98.95%	1.302.586	Hektar	1.302.586	100%	1.05%	(00)	-Sosialisasi Pengelolaan Kawasan Konservasi Pulau Pieh Saat Car Free Day di Kota Padang
REB	Konservasi Jenis/Spesies	250,000,000	247,994,778	99.2%							
001	Keanekaragaman Hayati Perairan T	250,000,000	247,994,778	99.2%	1	Jenis	1	100%	0.8%	(00)	penyelesaian laporan keuangan
SCC	Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan	700,000,000	683,583,027	97.65%							
001	Pengelola kawasan konservasi yang ditingkatkan kompetensinya	200,000,000	188,250,933	94.13%	10	Orang	10	100%	5.87%	(02)	Kegiatan sudah dilaksanakan namun pertanggungjawaban keuangan belum dilakukan/masih dalam proses
002	Masyarakat Pemanfaat Kawasan Konservasi yang ditingkatkan kapasitasnya	500,000,000	495,332,094	99.07%	23	Orang	37	100%	0.93%	(00)	kegiatan telah selesai dilaksanakan
HB	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	300,000,000	299,249,737	99.75%							
2366	Perencanaan Ruang Laut	300,000,000	299,249,737	99.75%							
PBT	Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	300,000,000	299,249,737	99.75%							
009	Rekomendasi kebijakan Monitoring dan Verifikasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut	300,000,000	299,249,737	99.75%	1	Rekomendasi Kebijakan	1	100%	0.25%	(00)	penyelesaian laporan kegiatan

